



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI V DPR RI
DENGAN
MENTERI PERHUBUNGAN RI**

Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	II
Rapat Ke-	:	2
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Selasa, 7 November 2023
Waktu	:	Pukul 10.15--13.15 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI - Jakarta
Acara	:	1. Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023; 2. Membahas program/kegiatan TA 2024; 3. Lain-lain.
Ketua Rapat	:	Lasarus, S.Sos., M.Si. (Ketua Komisi V DPR RI/F-PDI Perjuangan)
Sekretaris Rapat	:	Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI
Hadir	:	A. PIMPINAN

1. Lasarus, S.Sos., M.Si. (Ketua Komisi V DPR RI/F-PDI Perjuangan)
2. Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG)
3. Robert Rouw (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-Nasdem)
4. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com. (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PPP)

B. ANGGOTA DPR RI:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

5. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
6. Mochamad Herviano
7. Ir. Sudjadi
8. Harvey B. Malaihollo

9. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos.,
MCOMN&MEDIAS

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

10. Drs. Hamka B Kady, M.S.
11. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
12. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
13. Ilham Pangestu

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)**

14. Ir. Sumail Abdullah
15. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
16. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
17. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
18. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.

FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

19. Drs. H. Tamanuri, M.M.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-
PKB)**

20. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

21. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
22. Willem Wandik

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-
PKS)**

-

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

23. H. Boyman Harun, S.H.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)**

-

- Izin :
1. Hj. Sadarestuwatim S.P., M.MA. (F-PDI Perjuangan)
 2. Sri Rahayu (F-PDI Perjuangan)
 3. Ir. Effendi Sianipar (F-PDI Perjuangan)
 4. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H. (F-Nasdem)
 5. Drs. H. Soehartono, M.Si. (F- Nasdem)
 6. Sri Wahyuni (F- Nasdem)
 7. Drs. M. Fadholi, M. Ikom. (F- Nasdem)
 8. H. An'l, Falachudin Mahrus (F-PKB)

9. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M. (F-PKB)
10. Ir. H. Sigit Sosiantomo (F-PKS)
11. KH. Toriq Hidayat, Lc. (F-PKS)

Undangan

1. Menteri Perhubungan RI (Ir. Budi Karya Sumadi);
2. Pejabat Eselon I Kementerian Perhubungan RI beserta jajaran.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati.

Yang saya hormati Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya,
Terima kasih Pak Menteri sudah hadir di undangan kami,
Hadirin sekalian yang berbahagia,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini setelah sekian lama kita melaksanakan reses dan hari ini kita melakukan Raker yang pertama dengan mitra kita hari ini adalah Menteri Perhubungan.

Menurut informasi dari sekretariat, hari ini sudah hadir 20 Anggota yang menandatangani absen dari 6 unsur fraksi yang berbeda. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat ini sudah memenuhi kuorum.

Dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) rapat kerja Komisi V DPR RI pada hari ini dengan Kementerian Perhubungan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Menteri Perhubungan beserta seluruh jajaran yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan program atau kegiatan Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2024 dan lain-lain yang dipandang perlu.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Menteri Perhubungan beserta seluruh jajaran,
Hadirin yang berbahagia,

Adapun hal-hal yang menjadi catatan kami terkait evaluasi APBN tahun 2023, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan per 6 November 2023 adalah sebesar 68,63%. Jika dibandingkan tahun 2022 realisasi pada bulan November 2022 mencapai 75,48% dan pada akhir 2022 mencapai 98,04%.

Oleh karena itu, maka Kementerian Perhubungan perlu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran agar realisasi tahun anggaran 2023 sesuai dengan progress atau prognosa, *sorry*, agar realisasi tahun 2023 sesuai dengan prognosa, yakni 97,91%.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan program kegiatan tahun 2024. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi dan kinerja, sehingga realisasi anggaran dapat berjalan maksimal sesuai saran, masukan dan pendapat Komisi V DPR RI.

Selain itu, berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi V DPR RI, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari Kementerian Perhubungan dalam rapat kerja kali ini.

Yang pertama agar proyek-proyek infrastruktur perhubungan yang telah diprogramkan pada tahun 2023 terselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

Yang kedua, perlu untuk melanjutkan kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional di seluruh provinsi melalui peningkatan dan perluasan kegiatan padat karya.

Yang ketiga, perlu meningkatkan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antara pelabuhan, bandara, stasiun dan terminal. Dan yang keempat, perlunya kebijakan afirmasi dari Kementerian Perhubungan terhadap tingginya atau mahalannya harga tiket di sektor transportasi udara khususnya menjelang libur akhir tahun atau Nataru.

Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia,
Pak Menteri,

Beberapa waktu yang lalu, kementerian, teman-teman sekalian, ini mohon diatensi Bapak-Ibu sekalian, teman-teman dari Banggar jugak Pak Syarif, kebetulan Wakil Banggar ada di sini. Saya menerima permintaan dari Kementerian Perhubungan terkait pergeseran anggaran dari direktorat jenderal lain ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Tapi waktu itu kami sepakat dengan Pak Menteri tidak kita lakukan, kan gitu ya, Pak Menteri ya, tidak kita lakukan. Karena pergeseran antar direktorat jenderal itu harus diputuskan di rapat komisi dengan usulan yang disampaikan juga di rapat Komisi, ada kesimpulan di rapat Komisi karena itu bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan rapat untuk diserahkan dan disahkan dalam Paripurna dan sebagai pengantar pula atas persetujuan DPR kepada Pemerintah dalam hal ini juga dikirim ke Kementerian Keuangan.

Nanti Pak Menteri, kalau memang masih dipandang perlu terjadi pergeseran, sekarang lah waktunya nanti Pak Menteri untuk menyampaikan. Yang mana yang perlu dirasionalisasi atau dianggap menjadi kebutuhan dari Kementerian Perhubungan untuk dilakukan pergeseran-pergeseran sesuai dengan petunjuk dari pemerintah dan seterusnya. Nanti Pak Menteri silakan

sampaikan di forum yang terhormat ini dan seluruh Anggota Komisi nanti boleh menanggapi apa yang akan disampaikan oleh Pak Menteri tersebut.

Saya rasa itu sebagai pengantar rapat kita pada hari ini.

Saya persilakan sepenuhnya waktu saya berikan kepada Menteri Perhubungan untuk menyampaikan sesuai dengan undangan rapat kita hari ini terkait dengan materi rapat hari ini.

Saya persilakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (IR. BUDI KARYA SUMADI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi,

Shalom,

om swastiastu,

namo buddhaya.

Salam kebajikan,

Salam kebangsaan dan salam Pancasila.

Yang saya hormati Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua,
Yang saya hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi V,
Yang saya hormati rekan-rekan Kementerian Perhubungan, dan
Hadirin sekalian,

Tentu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bertemu dalam tugas negara untuk mengevaluasi APBN 2023 dan pembahasan program dan kegiatan tahun anggaran 2024.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan
Para Anggota Komisi V yang saya banggakan,

Dalam *slide 2*, kami sampaikan bahwa alokasi anggaran Kementerian Perhubungan pada 2023 sebanyak 33,44 triliun. Pagu tersebut kemudian mengalami recomposisi, sehingga akhirnya kami mendapatkan sebanyak R36,08 triliun.

Selanjutnya, proporsi daripada Kementerian Perhubungan dari rupiah murni sebanyak 18,8 Triliun, SBSN 9 triliun, PNBPN 4,24 triliun, BLU 1,95 triliun, PHLN 1,99 triliun.

Slide 3, disampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian Perhubungan pada 6 November sebanyak 68% atau 24,76%. Harapan kami, kita bisa melaksanakan lebih baik dari tahun lalu sesuai dengan harapan Bapak Ketua tadi. Dan memang dari rincian tersebut, belanja pegawai yang sudah melampaui, sedang yang lain relatif belum mendapatkan satu jumlah yang

banyak. Sedangkan Eselon I yang sudah mencapai, Irjen, BPTJ, BKT dan Setjen.

Slide 4, kami laporkan Bapak bahwa realisasi PNBPN dan BLU dari tahun ke tahun sampai 2023 ini mengalami kenaikan yang sangat berarti adalah 86,50% dari target sudah tercapai. Untuk rincian PNBPN sebanyak 6,7 triliun atau 83% sedangkan BLU sebanyak 1,6 triliun atau sudah melampaui target.

Slide 5, kami jelaskan bahwa target dari realisasi PNBPN Kementerian Perhubungan 2023 mengalami peningkatan sebelumnya dengan 10 penghasil PNBPN terbesar dari layanan kepelabuhan, pendidikan, kendaraan bermotor, sarana bantu navigasi, jasa konsesi, jasa navigasi penerbangan, telekomunikasi pelayaran, penggunaan prasarana kereta api, jasa perkapalan lautan, bandar udara dan hal-hal yang tersebut di situ.

Slide 6, kami laporkan bahwa selanjutnya dalam rangka memaksimalkan PNBPN. Pada tahun ini Kementerian Perhubungan mengupayakan penguatan regulasi melalui percepatan revisi PP PNBPN untuk pelayanan PNBPN baru dan mempercepat penyelesaian aturan teknis, pemungutan TAC.

Kami juga melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan PNBPN melalui kerja sama pemanfaatan sewa dan simpul transportasi serta melakukan penagihan piutang dari PNBPN. Selain itu, juga dibutuhkan juga langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu mendisiplinkan dan pelaksanaan sesuai dengan rencana kegiatan. Melakukan akselerasi dari pelaksanaan program, lalu meningkatkan kualitas belanja yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir meningkatkan monitoring dan evaluasi khusus terhadap rencana penarikan dana.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan
Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi V,

Dalam *slide 7*, kami laporkan bahwa Surat Menteri Keuangan 25 September dapat kami sampaikan bahwa anggaran Kementerian Perhubungan pada 2024 sebanyak 38,06 triliun. Dan hal tersebut komposisi belanja pegawai sebanyak 10% atau 4,2, belanja operasional sebanyak 11% dan non-operasional 79%. Untuk rincian dari sumber dana rekomposisi rupiah murni 23 triliun, PNBPN 8% atau 3 triliun, BLU 4% juga ... (rekaman suara kurang jelas) PHLN dan SBSN 26% dan pagu yang berdasarkan program yang dialokasikan manajemen sebanyak 26% dan juga pendidikan sebanyak 6%. Untuk hal ini, kami sedang mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk menambah persentase rupiah yang bisa digunakan dari hasil khususnya PNBPN, Pak, supaya kami mendapat ruang anggaran yang lebih besar.

Nah, oleh karenanya, kami laporkan di *slide 8* bahwa komposisi yang adalah:

- Setjen 649 miliar;

- Irjen sebanyak 112 miliar;
- Darat 6,6 triliun;
- Laut 9,5 triliun; lalu
- Udara 7,7 triliun;
- Kereta api 9,6 triliun;
- BKT 196 miliar;
- BPSDM 3,7 triliun dan;
- BPTJ sebanyak 330 miliar.

Dalam *slide* 9, kami laporkan bahwa sesuai dengan rencana kerja Pemerintah yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kementerian Perhubungan memiliki komitmen dalam kebijakan anggaran prioritas anggaran antara lain:

- Pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif;
- Meningkatkan keselamatan dan keamanan sektor transportasi;
- Peningkatan SDM sektor transportasi;
- Pemerataan pembangunan nasional;
- Pelaksanaan pro kerakyatan;
- Keberlanjutan MYC;
- Pemenuhan PSN;
- Perencanaan IKN, dan;
- Angkutan massal perkotaan; serta
- Pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan
Para Anggota Komisi V yang berbahagia,

Dalam *slide* 10, kami laporkan bahwa Kementerian Perhubungan akan selalu berupaya dan penyediaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi nasional, peningkatan keselamatan transportasi serta peningkatan layanan masyarakat di tengah tantangan keterbatasan ruang fiskal, kami senantiasa terus berinovasi mencari solusi, agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat tetap terlaksana dengan baik dan layanan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa program kerja yang akan dilakukan yaitu dukungan pada IKN, kawasan strategis nasional, *buy the service* kami tetap hanya 10 kota, layanan keperintisan angkutan semua transportasi, tol laut, jembatan udara, peningkatan pemenuhan sarana prasarana transportasi serta pendidikan pelatihan vokasi di transportasi.

Beberapa *highlight* kegiatan yang akan dilaksanakan 2024, antara lain: di sektor darat adalah dukungan IKN dengan kawasan strategis nasional, layanan keperintisan angkutan jalan, angkutan penyebrangan, subsidi LDF, angkutan multi roda dan angkutan barang di 33 provinsi. Program BTS sekali lagi saya pertahankan, akan kita pertahankan di 10 kota saja dan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur perhubungan darat pada tahun anggaran ini di 47 lokasi.

Lalu di sektor Perkeretaapian, dukungan pada IKN, layanan keperintisan kereta api di 7 lintasan, peningkatan fasilitas dan kapasitas prasarana serta keselamatan di kereta api, perawatan dan pengoperasian prasarana milik negara termasuk kereta api ringan Sumatera Selatan untuk IMO. Penyelesaian pembangunan jalur kereta api Medan-Binjai, pembangunan fasilitas kereta api Manggarai, peningkatan stasiun Tanah Abang dengan MYC 2023-2024 dan pembangunan jalur ganda Mojokerto-Sepanjang.

Sektor laut, dukungan IKN juga kita buat kawasan strategis pariwisata, penyelenggaraan angkutan laut dengan 39 trayek, perintis sebanyak 116 trayek, ternak 6 trayek, pembangunan pengembangan *replacement* rehabilitasi fasilitas pelabuhan dan sarana bantu daripada kegiatan pelayaran pembangunan rehabilitasi transportasi pelayaran.

Sektor udara, subsidi angkutan perintis akan menjadi satu konsen kami. Pengembangan 11 bandara baru ini diselesaikan di antaranya di Papua ada dua di Fakfak dan di Nabire dan di Sumatera Utara ada di Mandailing Natal. Pengembangan sektor udara ini diprioritaskan untuk KEK juga pembatasan daerah terisolir dan dukungan rawan bencana, dukungan kawasan sekitar dan KFCN, IKN melalui pembangunan bandara AP Pranoto dan bandara IKN.

Menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi berkaitan dengan kebutuhan udara, kita butuh dua, Pak. Satu itu adalah peningkatan perintis, kita tahu di kota-kota kecil itu sangat kurang perintisnya kita butuh dan kedua adalah bandara di IKN. Dan kami upayakan pengalihan anggaran itu dari udara, dari kereta api dan laut sehingga jumlahnya nanti kami laporkan secara khusus kepada Bapak-Bapak agar itu bisa dilakukan di tahun 2024.

Demikian Bapak Ketua yang saya hormati, demikian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Menteri.

Bapak-Ibu sekalian,

Demikian paparan yang disampaikan oleh Pak Menteri.

Di meja Pimpinan sudah ada beberapa teman yang meminta waktu untuk menyampaikan pendapat dan saran. Ya, Pak Syarif tadi mana ya? Oke, Abang duluan soalnya rambut Abang itu mirip-mirip sama belakang sana itu agak mengkilapnya sama sama belakang.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Saya juga izin, Ketua, mengkilap juga, Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Yang kiri jangan tersinggung.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Ketua, suka *nyinggung-nyinggung* mengkilap ini.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Saya kalau Pak Sumail asal jangan bawa rokok aja lah.

Silakan Pak Syarif yang pertama.
Siap-siap Pak Tamanuri.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera.

Ketua Komisi V beserta Pimpinan,
Yang saya hormati rekan-rekan Anggota Komisi V,
Bapak Menteri beserta seluruh jajaran,

Pertama, berkaitan dengan apa yang telah disampaikan, tentu kami ada beberapa yang menjadi sorotan terkait dengan program 2024 maupun yang 2023. Berkaitan dengan 2023, tentunya ada beberapa yang harus menjadi perhatian bagi kita terutama mungkin juga perlu penjelasan berkaitan dengan program-program yang lalu terhadap beberapa yang menjadi untuk diprogramkan terutama berkaitan dengan program pendekatan kepada Masyarakat ya.

Di antaranya sampai saat ini ada beberapa yang diajukan dari terutama Anggota DPR RI berkaitan dengan program tersebut, sampai saat ini kami juga belum mengetahui sampai sejauhmana program tersebut telah dilaksanakan. Terutama JPU dulu dan kita sudah mendata memberikan tapi sampai saat ini realisasinya juga belum terlaksana. Begitu juga dengan bis itu berapa sebenarnya yang sesuai dengan yang dimintakan pada saat itu ada dua kendaraan masing-masing Anggota, sampai saat ini realisasinya sampai sejauh ini.

Kemudian selain itu, berkaitan dengan program-program yang telah dilakukan. Saya ada beberapa program yang sampai saat ini, apakah ini akan diteruskan di tahun 2024? atau ini menjadi program yang bisa menjadi program tertunda. Ada beberapa yang sampai saat ini belum ada penyelesaian katanya, terutama di daerah saya.

Saya lihat ada beberapa pelabuhan antara yang telah dibangun oleh Perhubungan seperti pelabuhan ferry di Rasau Jaya kemudian di Teluk Batang, saat di 2024 ini saya melihat tidak terprogramkan itu. *Nah*, tentu kami berharap program-program ini seharusnya pada saat pemerintahan masa pemerintah 2019-2024, program-program yang sudah dilakukan itu sebaiknya itu diselesaikan semuanya, sehingga program-program itu tidak menjadi program mangkrak pada saat yang akan datang.

Nah, kita tidak tahu pada nanti ya mau tidak mau sesuai dengan konstitusi di tahun 2024 pasti ada pemerintahan baru. Tentu kita berharap siapapun yang menjadi Presiden Republik Indonesia ya tentu semuanya akan melanjutkan terhadap program-program yang sudah menjadi program sebelumnya. Namun dengan demikian, tentu ini menjadi perhatian terhadap program-program ini yang sudah, mungkin bukan hanya ini, beberapa yang kami sebutkan di antaranya tadi itu kebetulan di Dapil saya. Saya melihat itu ini pada saat 2024 tidak tercantum di dalam program ini.

Kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi, sebenarnya bagi kita, kebetulan saya di Wakil Ketua Banggar. Bagi kita di Badan Anggaran selama ini bagi apa yang disampaikan oleh kementerian yang sudah menjadi program tidak juga ada yang kita kurangi, tetapi selama itu memang sudah ada apakah itu penggeseran dan sebagainya. Namun dengan demikian, tentu saya berharap beberapa hal tadi tentu menjadi perhatian di dalam rapat hari ini.

Terima kasih.

*Wallahul muafiq illa aqwamit thoriq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Makasih, Pak Syarif.

Pak Tamanuri, bersiap-siap Pak Ali Mufthi.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pak Ketua dan Pimpinan,
Yang terhormat kawan-kawan Anggota Dewan,

Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran,
Hadirin yang berbahagia,

Saya juga ingin mengulas sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Syarif tadi bahwa di kami, Komisi V ini terbagi dua, ini atas aduan daripada kementerian, saya nggak tahu tuh kenapa dasarnya. Yang jelas mengenai JPO, ada 7 provinsi tidak dapat yang lain dapat.

Nah, ini mengakibatkan seperti saya jujur saja, karena ada teman di bawah itu, temannya Pak Iwan, beliau dapat, beliau sudah tanam beberapa titik-titik, loh saya yang punya Dapil, saya nggak dapat. *Nah*, ini kan menghancurkan saya punya karier itu di situ di depan mata masyarakat. Jadi bukannya Pak Menteri mau menambah dorongan sugesti terhadap kami untuk mendapatkan dukungan, tapi ini justru menghancurkan kredibilitas saya di masyarakat, karena orang mengatakan “kok itu bisa dapat? Bapak yang dulu sudah keliling untuk mengumpulkan data-data, tidak dapat”. *Nah*, jadi ini saya pernah mendengar, bahwa ini karena apa istilahnya, ada yang ajukan dengan kode ini, ada yang diajukan dengan kode ini. Loh, kenapa kok kode-kode itu dipisah-pisahkan? Kami sendiri ini jadi nggak enak ini. *Nah*, oleh karena itu mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya, Pak. Nggak mungkin juga kami akan jelaskan ke masyarakat, nggak ada perlunya lagi ini sudah habis waktunya sudah bulan 11.

Kemudian di samping itu, hasil daripada penyerapan Kementerian Perhubungan 2023 ini ada dua Dirjen yang masih kecil sekali yaitu 71%, yaitu Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut. Ya, ini minta keterangannya kenapa yang lain bisa diatas 80, sedangkan yang dua ini hanya 71. Hilang nih.

Kemudian, ini agak bolak-balik nih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya, kita nggak dengar nih, Pak, dari sini juga kita nggak dengar ini. Ya, mungkin sudah bisa ditangkap kali, Pak ya.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Macam gitu, saya buka lagi nih?

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Buka saja silakan.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Buka lagi ya, *nah*, jadi oleh karena itu...

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ditutup nggak enak, Pak.

F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Jangan khawatir, Pak.

F-NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Saya sudah ada di sini juga, Pak.

Jadi kira-kira dua hal itu, Pak, yang sangat-sangat mendasar bagi saya, mudah-mudahan Bapak bisa terangkan. Jadi ya walaupun bagaimana ya kami bisa menerima dengan tentu dengan pertimbangan dengan rasa yang kecewa.

Sekian.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Walaikumsalam.

Buka saja, Pak, jangan khawatir, tadi sambungannya apa Bapak bilang? Oh, Bapak ada di situ.

Baik, selanjutnya Pak Ali Mufthi, silakan.

F-PG (DR. H. ALI MUFTHI, S.AG., M.SI.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V beserta seluruh Anggota Komisi V,

Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan beserta seluruh Dirjennya dan staf-stafnya,

Terima kasih Pimpinan, atas waktunya.

Ada beberapa hal, Pak Menteri, Pimpinan, yang ingin saya sampaikan. Saya sudah melepaskan kepentingan politik daerah pemilihan, karena memang dari pada mengharap terus tidak wujud, itu nggak enak, Pak Menteri. *Nah*, oleh karena itu, kepentingan politik Dapil ini sudah saya lepaskan dalam konteks kita bicara pada hari ini.

Pak Menteri, Bapak-Ibu semua, Pimpinan yang saya hormati,

Beberapa bulan yang lalu, di tempat ini, kita Komisi V rapat dengan Sekjen Perhubungan, ada Irjen Perhubungan. Ada persoalan yang mendasar yang itu sampai hari ini belum terjawab, adalah antara perencanaan terus di *output*-nya di situlah peran lembaga ini untuk mewujudkan, antara perencanaan dan *output* ada seluruh perangkat sumber daya manusia, ada namanya Dirjen dan semuanya yang itu semua mengawasi perjalanan kementerian ini, agar apa yang direncanakan itu bisa diwujudkan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,
Pak Ketua dan Pimpinan dan Pak Menteri,

Saya menangkap persoalan yang mendasar, kenapa Kementerian Perhubungan sampai 6 November 2023 masih realisasi 68%. Ada uang 12 triliun sampai hari ini, Bapak-Ibu sekalian, itu yang belum diwujudkan di dalam satu *action* di dalam kementerian ini. Ini sebenarnya ada apa? Ingat, kita ini sudah mau Desember-Januari 2024, masih ada uang 12 triliun lebih di kementerian ini yang belum diwujudkan.

Kalau saya baca strukturnya, kementerian ini cukup, kita bicara SDM-nya cukup, perangkatnya cukup dan semua yang dibutuhkan, infrastruktur yang dibutuhkan cukup. Tapi ada persoalan yang mendasar kenapa begitu susahnya kementerian ini mewujudkan sebuah program yang tepat waktu. Pada bulan Juni, Pak Menteri yang saya hormati, ada Sekjen ada Irjen di tempat ini saya sampaikan sampai bulan Juni mereka belum bisa memberikan eksplorasi secara baik apa yang dilakukan oleh kementerian ini.

Nah, oleh karena itu, ini evaluasi karena saya baca undangannya adalah evaluasi sampai akhir Oktober di dalam dokumen yang saya baca 6 November ini masih ada uang 12 triliun. Ini gimana? kenapa? Adakah persoalan-persoalan *resource* kita SDM-nya yang memang seperti dulu. Dulu kita punya orang Jawa mengatakan, kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat, gitu. Saya cukup prihatin, karena kalau saya baca jejak digital Bapak Menteri ini, beliau adalah orang profesional. Para direktornya, Dirjennya kualifikasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi direktifnya sampai implementasi di tingkat bawah, apakah ada persoalan?

Pak Menteri dan Pimpinan yang saya hormati,

Kita ini pengelolaan negara itu uang disediakan, sumber daya manusia disediakan, struktur ada, instrumen-instrumen yang lain disediakan semua.

Tetapi sampai bulan 6 November ini uang rakyat belum diwujudkan secara baik oleh kementerian ini, sesuatu yang sangat merisaukan hati saya, membuat galau ya otak dan hati saya, kenapa ada 12 triliun pada hari ini tanggal 6, kalau hari ini tanggal 7, ini tulisannya tanggal 6 November, ada uang sekian itu. Apakah memang uangnya belum ada di Kementerian Keuangan? Apakah lelangnya yang belum efektif? Apakah SDM-nya belum cukup? Apakah ada persoalan-persoalan deviasi didalam struktur ini? sehingga uang 12 triliun belum dilaksanakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Akhirnya apa Bapak-Ibu sekalian, Pak Ketua, Pimpinan ini? Akhirnya yang jadi korban ada sebagian kita yang protes, karena PJU nggak jalan, macam-macamnya agak ini sehingga kita ini terobati dengan kementerian yang lain yang Januari sudah ada perjalanan, Februari ada pergerakan, Maret ada eksekusi, April ada kegiatan ada evaluasi, itu dilakukan secara periodik oleh kementerian lain. Seandainya Kementerian Perhubungan ini tergambarkan seperti itu betapa indahnya Republik Indonesia ini.

Demikian Pak Ketua, Pimpinan, Pak Menteri yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Makasih, Pak Ali Mufthi.

Selanjutnya Pak Hamka.
Bersiap-siap Pak Willem. Pak Hamka.

F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, MS.):

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya,

Ada 2 hal yang ingin saya mengingatkan dan sekaligus memberi saran.

Yang pertama, Pak Menteri, saya sependapat dengan Pak Mufthi. Tentu kita mempertanyakan serapan anggaran yang begitu rendah, sedangkan waktu yang masih tersisa sangat pendek. Namun demikian, saya sudah membaca dan barangkali Pak Menteri juga menghayati dan melihat hal itu, sehingga saya senang juga ada percepatan pelaksanaan anggaran dalam tulisan ini. Terjawab tetapi saya berharap kedisiplinan ada empat poin yang Pak Menteri kemukakan dalam hal ini, bahwa kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan. Apa poinnya di situ, Pak? berarti ada sesuatu yang tidak disiplin melaksanakan ini.

Yang kedua, melakukan akselerasi ya ini saya setuju nih. Langkah-langkah konkrit ini yang harus kita lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Pak Menteri. Kegagalan Pak Menteri nanti termasuk kegagalan kami, pasti orang bertanya itu, Pak Menteri. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas. Dan yang keempat, meningkatkan monitoring. Keempat ini memang sudah jawabannya,

Pak Menteri. Saya hanya menagih kepada seluruh jajaran, tolong diimplementasikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini November sudah minggu pertama, sudah mau masuk minggu kedua dan ketiga, tidak dirasa sudah bulan Desember yang akan datang. Oleh karena itu, Pak Menteri, saya sependapat dengan ini, tolong di-push sedikit karena banyak pertanyaan.

Yang kedua, hasil kunjungan reses kami, apakah itu reses komisi, apakah itu reses perorangan, kebetulan saya mengikuti reses komisi di salah satu daerah yaitu Morowali, Pak Menteri. Saya ingin menitipkan hal-hal yang mengenai aturan-aturan mengenai Tersus dan terminal umum, banyak hal yang saya dapatkan di lapangan musti menjadi perhatian. Sebab apa, Pak Menteri? Bahwa menurut Pasal 57 angka 23 Perpu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran, bahwa terminal khusus itu dapat dibangun, ada dua poin.

Pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tersebut. Yang kedua, berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis, ini yang ingin saya pertanyakan di lapangan itu masih merajalela yang namanya Tersus-Tersus terus-terusan. Walaupun saya sadar juga, bahwa, terima kasih Pak Dirjen sudah mengeluarkan surat keputusan Dirjennya ya, sisa di bawah itu tolong diimplementasikan, Pak.

Saya sedih kalau ini tidak tertata dengan baik akibatnya adalah PNBP yang akan merosot. Ini baru satu kasus yang saya dapatkan, eh sorry dua, Pak, satu di Banjarmasin, satu di Morowali. Nanti dengan rapat teknis dengan Pak Menteri akan saya beberkan semua secara teknis, ini hanya umum dan saya hanya mengingatkan bahwa itulah temuan-temuan kami dan saya yakin dan percaya bahwa PNBP yang diprogramkan ini bisa naik menjadi dua kali lipat apabila itu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan aturan yang berlaku.

Ini saja, Pak Menteri. Saya titip ini karena juga simpang siur dibawah pelaksanaan-pelaksanaan namanya terminal khusus, terminal umum. Salah satu point mengatakan terminal khusus itu baru dilakukan diberi izin untuk membangun apabila tidak ada tidak bisa pelabuhan terdekat meng-cover semua kegiatan-kegiatan di sekitar itu, itu undang-undang, Pak Menteri.

Terima kasih, Pimpinan. Mudah-mudahan ini baru pembukaan case-nya. Data dan semua persoalan di bawah mengenai Tersus dan terminal umum sudah sama saya dalam dua daerah sampel Pak Menteri dan Pak Ketua.

Terima kasih.

Demikian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, Pak Hamka, terima kasih.

Ini jadi konsen kita dulu Pak Hamka, ya konsen kita terkait dengan terminal khusus kemudian terminal umum karena ini ada kaitannya dengan proses penarikan PNBPN, kemudian ada kaitan dengan besarnya PNBPN yang diterima oleh negara dalam hal ini melalui Kementerian Perhubungan.

Baik, sudah bisa kita tangkap, intinya nanti Pak Menteri mungkin bisa jelaskan.

Selanjutnya Pak Willem Wandik.
Bersiap-siap, Pak Sumail.

F-PD (WILLEM WANDIK):

Baik.

Pak Ketua, Pimpinan dan Bapak Anggota Komisi V, dan Pak Menteri Perhubungan, serta Seluruh jajaran yang kami kasihi dan kami hormati,

Dalam evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 ini, kami juga ingin memberikan beberapa catatan terkait dengan penyerapan anggaran. Pertama, penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan sampai 6 November 2023 ini, kami melihat baru sebesar 68% dari pagu 36 triliun. Bahkan realisasi belanja modal sebagai pagu investasi baru sebesar 63%.

Demikian juga masih ada realisasi anggaran dari unit kerja Eselon I Dirjen Perkeretaapian yang baru terserap 50%. Karena itu, kami harap kondisi realisasi ini betul-betul diperhatikan agar penyerapan di Kementerian Perhubungan di tahun 2023 ini bisa terserap sesuai target atau mungkin paling sedikit 98%.

Dan juga harapan kami, tentunya perlu dijelaskan juga terkait realisasi anggaran yang bersumber dari PHLN karena ini juga sudah terbebani dengan pengembalian cicilan dan juga hutang dan bunganya. Dan yang berikut terkait dengan realisasi PNBPN dan juga BLU Kementerian Perhubungan, kami melihat di sini tercatat 86%. Kami harap juga diperhatikan supaya bisa mencapai target yang telah direncanakan.

Dan yang berikut terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Kami harap sebaiknya disampaikan juga pada kesempatan rapat evaluasi ini terkait perkembangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di sektor perhubungan di penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN di Kalimantan Timur.

Dan yang berikut itu terkait dengan usulan dimana kami pernah lakukan kunjungan komisi ke Kupang, NTT. Itu kami temukan di sana dia ada bandara berbatasan langsung dengan Timor Leste, itu kami melihat butuh perhatian dari Kementerian Perhubungan karena ini juga mempertaruhkan wibawa kita dalam praktek berbangsa dan bernegara.

Memang bandara terminal tipe A di Pemaku sana sudah dibangun baik, tapi perlu ada peningkatan supaya lebih layak, karena itu kiranya bisa menjadi perhatian juga. Dan juga masih ada kekurangan juga yang kami temukan di perbatasan penyebrangan antara Timor Leste dan Indonesia di sana, kami melihat ada beberapa kekurangan di sana, kiranya bisa menjadi perhatian juga.

Dan yang berikut Pak Menteri dan para Dirjen, tentunya sudah diketahui bahwa kami di Papua ini transportasi utama adalah udara baik mau ke desa, mau ke kecamatan, mau ke antar kabupaten, antar provinsi semua harus udara hingga hari ini karena masih menghadirkan defisit infrastruktur dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di sana. Karena itu, setiap kali dalam rapat-rapat dengan mitra kami selalu menyampaikan soal pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan Lapter-Lapter di Papua sana, terutama di Lapago dan juga Meepago, karena mereka lebih banyak menggunakan transportasi udara untuk pesawat-pesawat perintis memang itu dibutuhkan lapangan-lapangan terbang kecil yang disebut Lapter itu perlu jadi perhatian. Apalagi sekarang sudah diberikan DOB hampir jadi 4 kabupaten, provinsi di sana sehingga totalnya 6 provinsi. Ini pun akses jangkauan masyarakat di daerah-daerah semua menggunakan transportasi udara.

Karena itu, perlu ada perhatian, memang kadang diharapkan itu jadi kewenangannya pemerintah daerah. Tapi perlu ketahu di sini bahwa tanah Papua hingga hari ini belum bisa ada kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di sana, masih terjadi ketergantungan yang begitu tinggi terhadap kebijakan afirmasi anggaran pusat terhadap kebijakan subsidi fiskal pusat.

Karena itu, dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur katakanlah pembangunan bandara kecil atau Lapter seperti ini, tentunya sentuhan-sentuhan dari yang bersumber dari APBN sangat dibutuhkan. Dengan demikian bisa memberikan harapan dukungan terhadap penyelenggara di daerah dalam rangka menjangkau daerah-daerah yang terisolasi, terisolir dan bisa berjalan baik.

Baik, itu yang bisa saya dapat sampaikan pada kesempatan ini dan secara terperinci akan kami sampaikan pada saat rapat dengan para Eselon I.

Sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Makasih, Pak Willem.

Pak Sumail, bersiap-siap Pak Eddy Santana.

F-GERINDRA (IR. H. SUMAIL ABDULLAH):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri beserta segenap Eselon I dan seluruh jajaran,

Berkaitan dengan evaluasi kegiatan tahun 2023 yang capaiannya 68%, saya sangat sanksi atau meragukan ini bisa kementerian merealisasikan dengan baik dan sempurna sampai akhir tahun, Pak. Tentu ini menjadi catatan bagi kita agar tahun-tahun ke depan tidak terjadi lagi. Ada hal baik yang dari Kementerian PUPR barangkali kita bisa adopsi atau introduksi di Kementerian Perhubungan yakni lelang dini, Pak, sehingga tidak terjadi lagi penumpukan-penumpukan kegiatan proyek di akhir tahun.

Saya sangat mengerti dan memaklumi sebenarnya, seluruh SDM yang ada di Kementerian Perhubungan ini adalah dengan kualifikasi kelas tinggi lah profesional semuanya. Tadi dibedah sama Pak Ali, kira-kira faktor-faktor X-nya dimana ini?, faktor penghambatnya di mana ini. Apakah memang tidak ada dananya? atau karena dorongan dari pusat tidak mampu segera dilaksanakan di tingkat bawah di tingkat PPK, di tingkat Satker, dan lain-lain sebagainya.

Saya kira mohon ini ke depan tidak terjadi lagi karena rakyat menunggu, Pak ya, sementara kami juga sudah mau mengakhiri masa jabatan, tanggal 14 Februari kami juga pilihan terus kemudian November barangkali ada di antara kita. Ya, tapi harapannya bahwa kita semuanya hadir lagi di tempat yang terhormat ini, kata Pak Ali hari keramat dan hari kiamat. Untuk itu, apa-apa yang telah disampaikan tempo hari melalui staf-staf Bapak, sedapat mungkin juga bisa direalisasikan. Karena ini merupakan janji politik kami atau tanggung jawab politik kami baik di Dapil maupun daerah-daerah jangkauan daripada fraksi-fraksi di mana kami ditugaskan memang untuk mengaspirasi, mengamplifikasi suara-suara dari masyarakat, Pak.

Selebihnya kami coba ingin melihat ke Dapil, Pak Menteri dan dari berbagai informasi kami dapatkan bahwa pelabuhan yang punya nilai *history*

besar yakni pelabuhan Panarukan dimana pelabuhan itu mempunyai nilai kesejarahan. Tempo hari saya mendengar, bahwa sudah mau realisasi, maksud saya mau dilakukan sebuah kegiatan revitalisasi terhadap pelabuhan Panarukan itu, Pak, namun hingga sekarang juga masih belum terealisasi.

Juga kaitannya dengan saya tidak bosan-bosan dan tidak henti-hentinya Pak Menteri kaitannya dengan..., dengan kepentingan Dapil, dimana masyarakat menitipkan suaranya ke kami. Saya sudah hampir 5 tahun juga, Pak, namun tidak ada kegiatan proyek yang betul-betul di kita sampaikan kepada kementerian, itu dianggap menjadi sebuah kegiatan yang strategis dan dibutuhkan oleh kementerian padahal masyarakat banyak menunggu.

Contoh misalnya pelabuhan Kalbut, ini kami sering kali juga menyebut, Pak, pelabuhan Kalbut, karena itu akan memicu, memacu dan sekaligus sebagai *trigger* untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Situbondo. Saya seminggu yang lalu bersama Dirjen Perhubungan Darat yang memang senantiasa intense untuk berkomunikasi dengan kami, terima kasih, Pak Dirjen. Kemarin juga meresmikan dermaga tambahan untuk yang diseberangkan ke Gilimanuk. Di situ juga ada ferrynya tentu, bahwa ini juga untuk membantu kelancaran arus lalu lintas dalam rangka menjelang Nataru.

Namun, penekanan kami disaat rapat Pak Menteri dapat kami sampaikan juga di hadapan Pak Menteri. Bahwa pada saat ini ada momentum besar terutama kaitannya dengan optimalisasi pelabuhan jangkar, Pak. Pelabuhan jangkar itu bisa menjadi pelabuhan alternatif dimana pelabuhan Ketapang yang luas arealnya saya kira tidak memadai untuk menampung kendaraan-kendaraan besar. Saatnya hari ini, Pak, pelabuhan jangkar bisa kita optimalkan untuk menyebrangkan kendaraan-kendaraan berat menuju ke Lembar. Tentu tidak hanya berupa himbauan saja, saya kira sistem juga harus diberlakukan di situ, Pak. Saya juga sudah bicara dengan ASDP untuk penjualan-penjualan tiket Ferizy maupun kita *introducer* juga mungkin ada *vendor-vendor* lain seperti Tiket.com ataupun yang di penyebrangan udara itu ada Traveloka bisa masuk di kita, Pak, sehingga tidak terkesan bahwa ini ada monopoli katanya dengan menyebrangkan orang yang antar pulau.

Nah, kalau sistemnya kita kunci saya yakin pelabuhan jangkar juga, Pak, ini akan tumbuh dan berkembang, ya sehingga juga ada kesetaraan keseimbangan pemerataan pembangunan. *Nah*, Banyuwangi yang sudah sedemikian padat itu bisa lebih terurai, Pak. Terlebih untuk jangka menengah mungkin jalan tol Probowangi dengan pemerintahan yang baru akan tersambungkan dengan luas areal pelabuhan yang begitu sempit, tidak akan mampu menampung jumlah arus kendaraan yang mau menuju Bali, tentu ini juga harus kita pertimbangkan, Pak Menteri.

Dan kemudian selanjutnya, saya selalu ditelfon oleh Pak Bupati Kabupaten Bondowoso kaitannya apapun namanya mau revitalisasi, mau reaktivasi terhadap jalur-jalur kereta api yang ada di Bondowoso, Pak, seperti itu kan. Kalaupun tidak bisa untuk mengkoneksikan antar kabupaten, minimal juga jalur-jalur kereta api itu bisa digunakan untuk apa namanya, seperti kereta

api wisata kayak gitu sehingga juga men-*trigger* juga pertumbuhan atau geliat-geliat ekonomi di sana, sekaligus juga menyambungkan ke kawasan Gunung Ijen yang menjadi permata lah, artinya menjadi andalan di dua kabupaten baik Bondowoso maupun Banyuwangi.

Kiranya itu, terima kasih, Pak Ketua, maturnuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Sumail.

Selanjutnya, Pak Eddy Santana, bersiap-siap Pak Irwan.

F-GERINDRA (IR. H. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Komisi V yang saya hormati dan yang terhormat,
Yang sama saya hormati, saya cintai teman-teman Anggota Komisi V,
Pak Menteri Perhubungan yang saya hormati, beserta
Seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Eselon I, Eselon II dan yang lainnya,

Yang pertama, Pak Menteri, saya ingin mengingatkan ini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Itu pelabuhan kembali terus menerus tanpa bosan saya mengingatkan pelabuhan samudera Tanjung Carat, Pak. Lalu yang kita diskusikan Pak Menteri sudah menyerahkan ke daerah, gitu ya, gubernur yang dalam hal ini akan dilaksanakan mencari investor oleh badan usaha milik daerah. Saya sampaikan waktu itu saya meragukan itu. *Nah*, betul, Pak, sampai berhenti gubernurnya sekarang sudah selesai nggak ada satu tiang pun di situ, nggak ada investor yang mau datang di situ.

Nah, saya kira sebaiknya ke depan, kita kembalikan lagi ke program ataupun rencana semula, gitu. Masukan, Pak, sedikit nggak apa-apa APBN gitu untuk dilihat oleh masyarakat, oleh swasta juga bahwa itu ada gerakan pembangunan pelabuhan samudera di situ sehingga baru kalau ada kelihatan di situ baru investor melirik. Saya juga menyarankan ke daerah segera bangun *power plan* di sana gitu, pindahkan industri-industri yang membuat polusi di Kota Palembang, itu pindahkan, beri stimulus di sana, tanahnya nggak usah sewa, gitu, baru jalan, Pak. *Nah*, saya kira ini jadi perhatian.

Kemudian yang kedua, pelabuhan penyebrangan dermaga penyebrangan ferry yang kecil, emang itu tapi sangat penting itu Seri Menanti

dan ke Muara Karang belum jalan juga padahal ferry-nya sudah ada dan sekarang dipinjamkan ke tempat lain. *Nah*, ini saya pertanyakan kapan ini, Pak Menteri, percepatan tindak lanjut dari pengoprasian dermaga Seri Menanti ke Muara Karang, hanya nyebrang sungai saja itu tapi kasihan motor-motor sekarang naik perahu semua gitu.

Nah, kemudian selanjutnya di BPSDM mungkin Poltekbang Palembang itu. Saya terus terang baru sekali, Pak, melihat ke situ ketika ada program padat karya, saya selalu rajin, Pak, datang kalau di undangan padat karya di Perhubungan ini. *Nah*, begitu saya lihat di situ, saya terkagum-kagum sudah ada sekolah itu, saya nggak pernah lihat. Ada Poltekbang di samping ada Poltektrans ya di Mariana ada lagi Poltekbang, penerbangan ini di dekat airport yang lama.

Nah, hanya setelah kami dalam ya Poltekbang ini hanya untuk mungkin teknisi gitu atau yang lain-lain yang berhubungan dengan penerbangan ya, tapi tidak ada untuk pilot gitu sekolah pilot nggak, sekolah penerbangan. Mohon ini dikembangkan lagi Pak Menteri gitu, karena ada peluang bagi Kementerian Perhubungan, Sekayu itu memberikan gitu, mau apa saja dikasih gitu, mau tanahnya mau lahannya, runway-nya sudah ada disitu.

Saya kasihan saja *runway* itu, gitu, yang di Sekayu itu, belum ada pesawat satu pun yang terbang semenjak dari bupati yang membangun itu. *Runway* itu sepertinya mubazir, jangan sampai jadi apa *runway* yang di Ranau tempat jemuran sapi, kerbau saja di situ gitu sekarang ini. Tapi itu daerah bukan kementerian, yang bangun daerah, makanya kami mohon bantuan gitu, dukungan Pak Menteri dan jajaran.

Nah, kemudian di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mohon juga diperhatikan. Kecil sekali anggaran terminal Alang-Alang Lebar dan terminal Alang-Alang Lebar di Palembang, Simpang Priuk di Lubuk Linggau. Saya tanyakan para kepala balai kasihan juga kecil sekali anggarannya sehingga untuk mengembangkan itu hanya moles-moles saja, Pak. Dan mereka memang bangun ini, Pak, bangun kantor balai yang mewah bagus sekarang, tinggal Pak Menteri meresmikan mungkin ya atau Pak Dirjen. Tapi untuk operasional kendaraan sendiri itu...itu...itu yang dipentingkan itu yang terabaikan, saya kira ini ini perlu perhatian.

Nah, sama seperti yang lainnya itu yang selanjutnya adalah saya mempertanyakan juga bus yang akan diterima bantuannya oleh daerah gitu. Kami sudah janji Pak janji seperti satu di Universitas Silampari, gitu ya, sudah lama nagih terus dan bahkan mengundang saya untuk kuliah umum di situ sekalian nganter bus katanya di bulan Desember ini. *Nah*, saya sudah iyakan mudah-mudahan Insya Allah bus itu sudah datang itu nanti kami antarkan ke situ, ya kita ikut ngantarkan sudah bahagia bangga, Pak, mereka juga akan tentu ada dukungan ke kami-kami.

Terakhir, Pak, waktu itu kita Kunsfik ke Aceh, Pak. Saya menjadi ketua tim ketua rombongan pengganti gitu ke bandara di Bireun Malikusalleh itu,

mereka kan minta. *Nah*, inilah, Pak, penyakit di Komisi V ini Kunsfik-Kunsfik itu ya, sepertinya hanya jalan-jalan saja, *ndak* ada yang direalisasikan. Harusnya kan *te-record* itu sudah dan Pimpinan sudah janji tuh mana yang dilakukan Kunsfik itu itu yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti ini, ternyata tidak ya, Kunsfik-Kunsfik tapi ini tidak ada perhatian yang lebih gitu.

Nah, ini jadi mohon diperhatikan juga, ini kita semua juga ini masuk saya kira Pimpinan mohon dukungan, Pimpinan. Jadi ini Kunsfik itu harus menjadi prioritas gitu. Percuma kita ngomong, malu, Pak, sudah disambut tari-tarian gitu dikalungkan bunga tapi *ndak* ada satu perak pun masuk kesana gitu. *Nah*, ini nih, jadi saya mengingatkan kembali Malikusalleh itu perlu perpanjangan runway dan pengaman lainnya, nah saya kira ini.

Dan penutup, ini saya yakin gitu kalau ini tadi teman-teman ini untuk 2023 ada tinggal percepatan ini kan di akhir ini tinggal bayar-bayar gitu tinggal apa gitu, sekarang 68%, Pak. Tapi ini jadi perhatian, warning juga, tahun 2022 realisasinya 75%, jadi masih di bawah 2022-2023 ini. Mudah-mudahan bisa dikejar satu bulan ini.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Eddy Santana.
Adinda Irwan silakan.
Bersiap-siap Pak Boyman.

F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan Komisi V yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan.
Yang saya hormati Menteri Perhubungan,
Dirjen Perhubungan Darat, Pak Irjen, Dirjen Perhubungan Laut, selamat,
Pak, baru dilantik semoga terus sukses,
Dirjen Perhubungan Udara beserta seluruh jajaran, Sesdik, Direktur dan
Jajaran Kementerian Perhubungan yang saya banggakan,

Pertama-tama, terima kasih, Pak Menteri, kemarin diajak bersama Pak Presiden untuk *groundbreaking* bandara VVIP IKN semoga tahun depan bisa fungsional dan menjadi bandara yang membanggakan kita semua dan mendukung fungsional IKN. Dan semoga Pak Menteri juga selalu diberikan kesehatan.

Pertama-tama, terkait APBN 2023, saya mau menyampaikan Pak Menteri bahwa rencana kita 2023 itu tadinya mau bangun pelabuhan laut di Penajam. Jadi bukan yang dermaga wisata untuk IKN ini, Pak. Kenapa ini menjadi penting, karena pasca IKN ini kalau ngelihat jalan dari Sepaku exit-nya di Petung kemudian menuju Kalimantan Selatan. Maka ke depan Kota Penajam ibukota PPU itu pasti terisolasi dan sampai sekarang nggak punya pelabuhan.

Nah, waktu pembahasan APBN 2023 kita sudah sepakati, Pak, sudah disetujui untuk bangun pelabuhan laut termasuk sisi darat dan sisi lautnya. Tapi tahun ini kita nggak lanjutkan, Pak Antoni, saya nggak paham kok nggak dilanjutkan. Padahal, menurut saya ini sangat-sangat penting juga untuk *supporting* terkait logistik maupun untuk penumpang ke depannya untuk di PPU ini. *Nah*, saya berharap ini bisa dilaksanakan karena pemerintah daerahnya juga sudah menyiapkan semua, Pak, syarat-syaratnya.

Kemudian yang kedua terkait program 2023 juga, ini yang sangat penting karena bicara mengenai keberlangsungan lingkungan khususnya di Teluk Balikpapan. Kita bicara IKN, hijau memperhatikan lingkungan, tetapi kalau Teluk Balikpapan ini rusak karena aktivitas, kemudian karena apa namanya, pencemaran lingkungan. Saya pikir itu juga jadi sesuatu yang apa namanya kita biarkan sejak awal kalau ini kita tidak laksanakan.

Nah, rencana pembangunan stasiun limbah yang akan dilaksanakan oleh KSOP Balikpapan, tahun ini juga harusnya dilaksanakan itu nggak terlaksana, Pak. Padahal sudah kita tetapkan di APBN 2023, padahal ini sangat penting menurut saya, sangat penting karena ini bicara masa depan, bicara isu lingkungan, keberlanjutan Teluk Balikpapan.

Nah, saya berharap kalau masalahnya apa namanya, itu tanahnya Pelindo, ini saya pikir bisa diselesaikan, Pak, kalau hanya masalah lahan. Tapi tujuan dan rencana dari Kemenhub sendiri ini sangat bagus, ini sebuah terobosan yang sangat bagus adanya stasiun limbah karena di sini ada Pertamina, Pak, yang dulu sudah pernah bocor dan terjadi pencemaran terkait Teluk Balikpapan ini. Jadi saya berharap program Kementerian Perhubungan ini bisa dilanjutkan, jangan kemudian tidak ada terutama kalau nggak bisa tahun ini ya di 2024.

Kemudian, Pak, saya melihat KSOP maupun KUPP di Kaltim ini trend-nya bagus, Pak, PNBP-nya semua meningkat baik di Paser, Balikpapan, Samarinda apa namanya Kualasamboja, Samarinda, Bontang, Sangkulirang, Berau. Tetapi saya lihat 2024, Pak, nggak ada, kita hanya fokus membangun dermaga IKN. Saya berharap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kemarin, Pak, dipimpin oleh Ketua Komisi V Pak Antoni juga hadir, kita meninjau Pak waktu reses Komisi V di Bontang. Pelabuhan KSOP Bontang, KSOP, Pak, Kelas II di Tanjung Laut itu hanya berapa meter beton sisanya kayu, sementara ini digunakan masyarakat dari Pemerintah Kota Bontang untuk angkutan logistik, juga angkutan penumpang, termasuk yang dari Sulawesi. *Nah*, saya berharap ini bisa direhab, Pak, fasilitas pelabuhannya. Karena ini juga kan

sangat potensial juga KSOP ini PNBPN-nya juga tinggi, termasuk juga rehab-rehab di KSOP KUPP lainnya untuk mendukung peningkatan PNBPN dan juga pelayanan masyarakat.

Kemudian terkait darat. Saya melihat, Pak, rencana Kementerian Perhubungan ini terkait ODOL ini apa, Pak ya? Saya terus terang geregetan di Kaltim melihat ODOL ini. Kami bersama PUPR dan Kemenhub, kita ini memperbaiki, Pak, konektivitas infrastruktur dan transportasi kita selama berapa tahun ini, dari kelayakannya cuma 60% jadi 86% tahun ini. Tapi, Pak, ODOL ini merusak, Pak, jelas-jelas merugikan negara. Jauh ini kita tangkapin apa namanya, eh tindakan korupsi dan lain-lain, tetapi ini kok kita biarin, ini kan sangat merugikan negara, Pak, puluhan triliun, ratusan triliun kalau setanah air kita gelontorkan tiap tahun, tapi kita biarin ini masalah ODOL ini apa nih, Pak. Saya juga, sudah kita baiki tahun ini, tahun depan angkutan perkebunan angkutan pertambangan bebas, Pak, beraktivitas seperti ini. Maksud saya langkah strategis kita terutama Kemenhub apa nih, Pak, khususnya di Kaltim. Ini kami sangat serius, Pak, karena apa namanya angkutan khusus tambang maupun CPO ini luar biasa merusak dan merugikan negara.

Kemudian yang terakhir terima kasih, Pak, untuk sektor perhubungan udara, kami juga bandara kami terus baik, baik di Balikpapan, di Samarinda, di Berau maupun juga bandara perintisnya. Kami berharap terus dibuat konektivitasnya agar tidak terjadi kesenjangan baru di Kaltim pasca IKN fungsional nanti.

Itu saja yang bisa kami sampaikan, mohon maaf ada kekurangan.

*Wabillahitaufik walhidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Walaikumsalam.

Adinda Irwan, saya mau tanya nih. Kemarin Demokrat menolak atau menyetujui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Tinggal kami, Pak, yang setuju.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Oh, tinggal Demokrat yang setuju.

F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Yang lainnya berubah, Pak.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, oke baik terima kasih Adinda Irwan. Jadi yang tadi Pak Irwan bahas....

F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Ketua, buka saja di Baleg, Ketua, kelihatan kok itu rekam jejaknya.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya nanti kita buka, ini balik-balik lagi nih kita ya.

ODOL ini *Over Dimension Over Loading* ini nggak bakalan bisa selesai kalau hanya dengan yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekarang, Pak ya. Buktinya apa? buktinya kita sudah punya kok di aturan di lalu lintas dan angkutan jalan, nggak bisa menyelesaikan masalah ODOL. Kaltim, Kalbar, Bang Syarif ya sebentar lagi kita, bauksit, kemudian CPO angkutan CPO, Kalsel tambang, Kalteng tambang, Kalimantan lah pada umumnya, Pak.

Jambi baru-baru ini kita bicara Jambi sampai hari ini mungkin belum selesai masalah Jambi yang kemarin. Pulau Jawa, nggak usah cerita kita, Pantura berapa triliun kita buang tiap tahun di Pantura. Ini buah dari tidak bisa kita revisinya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Nah, ini teman-teman Komisi V, PR kembali. Kemudian ODOL, ODOL juga kita belum atur ini ya di ODOL ini penerapan pajaknya yang lemah di aturan yang ada sekarang ya. Ini sekedar untuk refresh saja buat kita Adinda Irwan, terima kasih masukannya jadi PR kita kapan kita bisa revisi lalu lintas dan angkutan jalan ini.

Selanjutnya Pak Boyman Harun.
Bersiap-siap Bu Irine.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati,

Saya yang ringan-ringan saja, Pak, di ujung ini, karena pekerjaan kami ke depan sangat berat menghadapi 2024 ini. Jadi kalau Bapak Menteri barangkali di akhir masa jabatannya, pertanggungjawabannya kepada Bapak

Presiden, kalau kami ini pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat, Pak.

Jadi baik terhadap usulan pembangunan yang kami usulkan berdasarkan rapat-rapat kerja dengan mitra maupun yang dilaksanakan oleh rencana pemerintah, pada dasarnya di daerah kami semua itu pertanggungjawabannya ada di kami, Pak, sukses atau nggak-nya itu. Masyarakat tidak tahu apa itu Kementerian Perhubungan, masyarakat tidak tahu apa Kementerian PUPR, tetapi masyarakat tahu bahwa kami adalah perwakilan mereka di pemerintah pusat dalam rangka berjuang melalui APBN ini untuk membangun Dapil-Dapil yang kami perjuangkan.

Jadi harapan saya ke depan, hendaknya di 2024 apapun yang sifatnya usulan dari Anggota DPR maupun perencanaan dan pemerintah itu sendiri agar bisa direalisasikan dan Insya Allah itulah yang menjadi tolak ukur masyarakat untuk menilai kami sebagai wakil rakyat. Jadi harapan kami ke depan seperti itu.

Kemudian, Pak, berkaitan dengan masalah perencanaan di 2024, program 2024. Saya berharap pemerintah dalam perencanaan itu tidak setengah-setengah, Pak, maksudnya jangan sampai kita membangun tetapi tidak bisa dimanfaatkan karena tidak selesai perencanaannya. Sebagai contoh misalkan, *Insya Allah* di 2024, bandara Rahadi Oesman Kabupaten Ketapang itu kan mau direnovasi, Pak, mau direnovasi terminal termasuk runway-nya. Maksud saya kalau bisa tolong dihitung Kembali, apakah dengan anggaran yang sudah dikucurkan itu akan mencukupi sampai bisa beroperasi normal seperti semula. Karena bandara Kabupaten Ketapang itu pada dasarnya nggak ada masalah, Pak, artinya berjalan lancar. Kalau dibandingkan di seluruh Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang paling lancar transportasi udaranya, satu minggu bisa... satu hari bisa 3 kali penerbangan. Kalau tempat, Pak Ketua itu, Pak Lasarus, itu satu minggu hanya 2 kali, Pak, 3 kali penerbangan. *Nah*, jadi Ketapang itu sangat normal, jangan sampai ada renovasi justru menghambat maksud saya, menghambat pelaksanaan penerbangan di Kabupaten Ketapang. Jadi perencanaannya harus sesuai, jangan hanya asal masukan saja perencanaan gitu tetapi pembangunannya tidak selesai, itu satu.

Yang kedua, Pak, berkali-kali saya sampaikan masalah pelabuhan ferry Bangka Belitung, Pak, mungkin dengan sekarang sudah 20 tahun, Pak, mangkrak, tidak bisa dioperasikan. Jadi saya sudah berbicara juga dengan KSOP di Kabupaten Ketapang, Ketapang itu, Pak, Ketapang Kalimantan Barat itu kan belum ada Pelabuhan, Pak, sekarang yang ada itu, kita numpang, itu numpang di Pelindo. Maksud saya bagaimana di-*takeover* saja, Pak, dari darat ke laut pelabuhan Bangka Belitung ini dijadikan pelabuhan laut saja. Tetapi dilakukan perubahan-perubahan yang mendasar menurut saya, karena itu sudah tidak layak untuk dipakai, Pak. Saya sudah pernah pergi bersama dengan Ka.balai untuk meninjau masalah Bangka Belitung ini memang agak perlu perbaikan yang barangkali renovasinya hampir 80 sampai 90%, Pak. Tapi menurut saya disamping memang itu alurnya juga bagus dan Ketapang itu

memang belum ada pelabuhan, Pak, kabupaten-nya itu nggak ada pelabuhan, kalau Kecamatannya sudah ada, jadi yang ada sekarang itu numpang, Pak, jadi KSOP Kabupaten Ketapang itu numpang Pelindo, tidak ada pelabuhan.

Jadi, harapan saya 2024 tolong dievaluasi bagaimana kita *takeover* saja dari darat kita oper ke laut agar Ketapang punya Pelabuhan, Pak, karena Ketapang saya pikir salah satu kabupaten yang pertumbuhan ekonominya yang sangat luar biasa karena banyak perusahaan-perusahaan yang besar di sana. Kita ke depan pasti akan membutuhkan pelabuhan termasuk pendalaman sungainya, Pak, pendalaman sungai yang ada di Kabupaten Ketapang yang sangat dangkal.

Saya pikir itu, Pak Menteri. Semoga kerja sama kita ini berjaln dengan baik 2024 kami tidak sulit menghadapinya dengan Bapak tepati terutama janji-janji padat karya kita, Pak, sesegera mungkin untuk dikeluarkan.

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Boyman.

Baik.

Selanjutnya, oh ya saya juga baru pulang dari Ketapang kemarin, Pak Boy. Kegiatan di bandara Ketapang itu kemarin, saya kebetulan ketemu sama kepala bandaranya, Pak Menteri. Sampai sekarang kan belum lelang itu, Pak Boy, jadi tinggal waktu sudah bulan November sudah tanggal berapa ini ya.

Jadi saya rasa sudahlah luncurin tahun depan saja kalau bermasalah itu Pak Boy, mengganggu penerbangan akhir tahun saja kan itu. Kalau ketimbang nanti kerjaan nggak selesai, malah nimbulkan masalah lalu nanti nggak bisa dilanjutkan lagi tahun depan. Tapi teknis silakanlah kementerian baiknya bagaimana atau diluncurkan, Pak, di tahun depan atau boleh meluncur sampai tahun depan, gitu loh, jadi jangan sampai bulan Desember. Kalau sampai bulan Desember nggak mungkin, karena ini menurut keterangan kepala bandara kemarin itu, ini kan penambahan *strip*, Pak, kiri kanan. *Nah, strip* kiri kanan itu pakai tanah timbun gitu Pak Boy ya, tanah timbun itu ngambilnya jauh, dari luar Kota Ketapang. Belum kalau cuaca musim di akhir tahun ini nimbun nggak gampang, Pak, becek pasti hujan. Ini sekedar masukan saja, untuk di-atensi, karena saya baru juga pulang dari sana kemarin, bukan reses, ini Dapilnya Pak Boy dengan Pak Syarif ini, tapi karena saya Ketua DPD partai, jadi selalu kabar kita pergi, sambil-sambil mendengarkan masyarakat.

Baik, selanjutnya Bu Irine.
Bersiap-siap Pak Sudjadi.

F-PDI PERJUANGAN (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.SOS., MCOMN&MEDIASST.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran,

Hanya beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu apresiasi, Pak, ini salah satunya untuk realisasi BLU juga realisasi PNBPN yang memang targetnya jauh ya PNBPN ini dan memang belum 100% tercapai, tetapi ada program *extra effort* percepatan PNBPN yang tadi dipresentasikan di *slide* 6. Semoga ini bisa terlaksana dengan baik, Pak, jadi bisa mengoptimalkan PNBPN, itu yang pertama, Pak. Apresiasi juga untuk beberapa program yang di tahun 2023 telah terealisasi di daerah pemilihan kami di Maluku Utara, juga di beberapa tempat di Indonesia yang menjadi prioritas yang telah disampaikan oleh teman-teman di rapat kerja dengan Bapak.

Lalu tadi yang kedua, Pak, yang ingin saya sampaikan mengenai serapan anggaran yang juga sudah banyak dibahas oleh teman-teman, yang di bulan November minggu pertama baru besarnya 68,63%, Pak. Saya hanya ingin menegaskan Kembali, Pak, tentu masyarakat Indonesia Timur, terutama sebenarnya masih sangat butuh pelaksanaan program terkait konektivitas di wilayah Indonesia Timur, Pak. Dan Kementerian Perhubungan ini menjadi harapan kami untuk kami bisa mendapatkan kesempatan kelayakan hidup yang lebih baik gitu, karena memang transportasi dan konektivitas ini selalu menjadi tantangan kami.

Dan tadi yang juga telah disinggung oleh teman sebelumnya mengenai perencanaan program di Kementerian Perhubungan. Ini jangan setengah-setengah, atau kalau bisa dikatakan seyogyanya harus selalu tuntas, mengapa, Pak? ini salah satu contoh saja, Pak, di Dapil kami di Maluku Utara. Kita itu tahun 2020, Pak, di Morotai kita mendapatkan 3 unit bantuan bus air. *Nah*, pembangunan prasarana sandar bus air itu juga sudah dilaksanakan di tahun 2020. Tetapi yang perlu saya tanyakan di sini yang sudah terbangun itu hanya ada prasarana sandar bus yang di bus air yang ada di Dodola, gitu.

Nah, di tahun 2024 ini penyelesaian pembangunan prasarana tersebut juga sudah dianggarkan. Yang menjadi pertanyaan saya, kemarin saya Kundapil kunjungan ke Morotai, saya ngelihat bahwa fasilitas itu tidak bisa beroperasi sama sekali, Pak. Jadi cuma mangkrak saja di Daruba, gitu, karena memang fasilitas untuk prasarana sandar bus air di Daruba itu tidak ada, gitu.

Nah, ini harapannya tentu ketika melakukan penganggaran, ini juga mengutamakan prinsip yang tidak setengah-setengah itu Pak Menteri. Jadi harapan kami beberapa program yang sudah dianggarkan di 2024, itu beberapa perlu dikaji ulang untuk penambahan program supaya nanti hasilnya ketika memang fasilitas tersedia atau fasilitas itu sudah terlaksana

pembangunan infrastrukturnya, betul-betul bisa dimanfaatkan oleh Masyarakat. Itu yang pertama, Pak.

Lalu sedikit saja, tentu kami masyarakat Maluku Utara sangat menyambut baik, Pak Menteri, secara pribadi yang menjadi ketua panitia untuk Hari Nusantara di Tidore, gitu. Kunjungan kemarin, Pak, itu kunjungan Bapak di facebook saya saja ditonton ada 4.500 orang sendiri, Pak. Itu luar biasa sekali dan semuanya itu tanggapannya hampir 300 tanggapan komentar baik di Facebook maupun di Tiktok, itu positif. Artinya, kami tentu benar-benar berharap dengan hadirnya Bapak yang lebih sering ke Maluku Utara benar-benar membawa dampak yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan di Maluku Utara.

Satu saja, Pak, yang kemarin setelah apa namanya Bapak ke sana, saya beberapa titik saya datang. Itu teman-teman itu sangat mengeluhkan mengenai keberadaan kondisi pelabuhan Semut di Ternate, Pak, karena memang ini sudah rusak parah, saya datang ke situ semuanya sudah lobang-lobang. Sementara pelabuhan Semut ini menjadi penyebrangan yang sangat penting untuk kita menyebrang dari Ternate ke Halmahera dan juga ke Tidore.

Jadi, harapannya, Pak, sebelum Hari Nusantara di Tidore bulan Desember, ini juga menjadi fasilitas infrastruktur transportasi yang bisa mendapatkan sentuhan dari pusat sehingga ini bisa menunjang kesuksesan nanti untuk Hari Nusantara di bulan Desember tanggal 13 nanti.

Mungkin itu yang saya ingin sampaikan.

Terima kasih untuk kesempatannya, Pimpinan.
Terima kasih, Pak Menteri.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/ F-PG):

Makasih.

Pak Sudjadi, silakan Pak Sudjadi.

F-PDI PERJUANGAN (Ir. SUDJADI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan yang sangat-sangat saya hormati,
Bapak Menteri, Bapak Dirjen, Bapak Sekjen dan para Eselon II,

Mohon maaf, Pak Menteri, hari ini saya akan mengajukan pujian dan kritik, *to the point*. Pujian pertama, direktur yang mengenai bus hebat, tapi yang tidak hebat itu bagian distribusi. Saya kira itu anak buahnya Pak Sekjen, tolong, Pak, dicek itu kerjanya apa. Bis itu di Magelang saya itu kan ada 2, tinggal

ngambil, saya bilang sudahlah saya tadi, katanya yang bagian distribusi itu *mbulet*. Pak Direktur hebat, demi Allah.

Yang kedua, lampu, Pak. Saya, *alhamdulillah*, sekarang direktornya Pak Yani. *Alhamdulillah* dulu kalau mau ngurus itu mesti lancar dan ini-ini, ini *mbulet* lampu itu. Dulu rata-rata Anggota itu 200 sekarang hanya dapat 80, katanya dengan Bappenas dan sebagainya. Ya, kita kan orang pemerintah ya tahu Bappenas kan bukan penentu, diplomasi kan ada. Ini jadi *alhamdulillah* nih, Pak Yani moga-moga bisa mengembalikan marwah Perhubungan seperti dulu. Saya sudah tiga periode, Pak, jadi hafal kelakuan masing-masing itu.

Kemudian terminal, oke banget Pak Dirjen Darat. Yang tidak oke itu Kepala Balai Kereta Api Jateng, nggak pernah nongol, aku nggak ngerti orangnya kaya seperti apa itu nggak pernah nongol. Yang kedua, Bapak sudah *me-launching* Purworejo-Kutoarjo, reaktivasi.

Saya khawatir kalau ini Pak Dirjen Kereta Api, sampean tidak kenceng, itu kapusan meneh seperti di anu loh Semarang itu, sudah di-launching Pak Menteri, tapi alasannya PPK-nya korupsi, terus ilang, macet *kabeh*. Saya hanya itu, karena diakui atau tidak dari sekian itu mesti kalau diberi lampu banyak, mesti senang, bisnya dipercepat, mesti senang. Bagi yang tidak senang besok mesti tidak kepilih.

Sekian.

Terima kasih.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya, Pak Sudjadi, terima kasih, dengan gayanya lah ya khas kalau Pakde ini.

Selanjutnya Bu Novita.
Bersiap-siap Pak Mulyadi.

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Makasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan, Anggota, Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Pak Menteri, saya ucapkan terima kasih kepada program yang sudah turun, ada beberapa yang sudah turun seperti lampu sudah turun dan

beberapa, makasih. Dan yang program belum turun ada juga, jadi minta tolong untuk bisa segera diselesaikan.

Kemudian sama dengan teman-teman yang lain itu kunjungan kita, kunjungan kerja, itu mohon untuk bisa ada follow-up nya. Karena kalau kita kunjungan kerja, nggak ada follow-up juga sayang gitu tidak ada manfaatnya. Contohnya seperti waktu kita ke Sulteng, itu bandaranya minta ada perpanjangan, kemudian evaluasi tentang Tersus itu yang bisa untuk menambah pendapatan dari kementerian. Kemudian ini loncat-loncat.

Berikutnya tadi yang Dapil, pastinya programnya minta diselesaikan dan nanti ke depan ada lagi. Dan kemarin saya juga kedatangan Kuningan, Pak Menteri, Kuningan dan beberapa kabupaten karena nggak punya Anggota DPR Komisi V, minta tolong untuk bisa disampaikan permohonan, untuk seperti lampu, penerangan jalan, kemudian rambu-rambu lalu lintas dan juga *guardrail* itu ada beberapa Kuningan dan beberapa Kabupaten.

Kemudian tentang serapan ya, saya percaya pasti Pak Menteri dan jajaran akan maksimal bagaimana nanti di akhir bisa terserap secara maksimal. Ya, kita mendukung supaya semua program bisa terlaksana dengan baik.

Kemudian mengenai bandara Kertajati, Pak ya, saya ikut senang bandara sudah bisa beroperasi cuma saya belum tahu itu beroperasinya bagaimana karena kita juga dengarnya dari media. Berharapnya nanti tiketnya bisa terjangkau itu saja, minta tolong bisa di monitor untuk tiket-tiketnya dan kalau bisa itu bisa untuk naik haji, umroh itu, karena sangat berpotensi dan bisa meningkatkan perekonomian di bandara Kertajati.

Kemudian tentang kereta api, Pak, sudah bagus, apa lagi banyak program-program sinergi kereta api dengan KAI. Hanya PR-nya dari dulu ya itu palang pintu, Pak, kereta api masih banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi karena palang pintu yang masih banyak yang belum ada.

Berikutnya tentang BTS. BTS saya tadi lihat di sini, BTS hanya di 10 kota. Saya minta tolong 10 kotanya itu dimana saja? kemudian 10 kota ini apakah melanjutkan yang sudah ada atau baru? itu. Kemudian untuk Banyumas, saya Dapil Banyumas-Cilacap, ini Pak Hendro pasti tahu masalahnya. Jadi ada *MoU* dengan BTS itu sampai, kalau nggak salah ya saya juga nggak ngelihat *MoU*-nya, karena waktu tanda tangan saya nggak diajak. Itu sampai 2025, itu perjanjiannya dulu awal-awalnya perjanjian sampai 25 itu bagaimana, gitu, sejarahnya, yang jelas ada perjanjian *MoU* sampai 2025. Lah sedangkan sekarang informasinya kan tahu-tahu di stop, gitu, ada karena anggaran, karena apa, ya kita mendapatkan aspirasi. Ini tahu-tahu katanya ada instruksi untuk persiapan akan distop subsidiya apa gimana ya.

Mereka nggak sanggup, Pak, karena *MoU*-nya sampai 2025, diharapkan ya kalau yang sudah berjalan apa diselesaikan sampai selesainya *MoU* atau jalan tengahnya adalah daerah ini harus ada persiapan pembahasan anggaran. Kalau di stop sekarang, ini kan ini sudah akhir tahun, mereka tidak

bisa, anggarannya dari mana, gitu, karena di APBD kabupaten itu, anggaran dibahas pasti di awal tahun atau di perubahan, kalau mendadak distop sekarang mereka tidak ada persiapan. Jadi mohon itu bisa dievaluasi tentang BTS, Pak Menteri. Kalau bisa diselesaikan, selesaikan yang sudah berjalan, kalau yang berjalan selesaikan ya kalau ada yang baru itu, eh apa, mohon untuk penjelasan keterangannya bagaimana.

Terakhir, tentang pelabuhan Cilacap. Memang kalau Pak Menteri kayanya normalisasi atau pengerukan katanya belum ada program seperti itu. Tapi hari ini juga saya ingin menyampaikan permohonan tentang apa namanya pengerukan di pelabuhan Cilacap.

Demikian.

Terima kasih, Pak Menteri dan jajaran, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Bu Novi.

Selanjutnya Pak Mulyadi.

F-GERINDRA (DRS. H. MULYADI, M.MA.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih, Pimpinan.

Para Pimpinan yang saya banggakan, yang saya hormati, serta Rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan,

Pak Menteri dengan seluruh jajaran yang hadir di kesempatan rapat ini, mudah-mudahan sekali lagi, Pak, rapatnya tidak seremonial, retorika, menggugurkan kewajiban tetapi follow-up nya tidak maksimal ya Pak ya,

Pertama, tentu saya harus mengapresiasi, Pak, terkait kinerja Bapak yang luar biasa, walaupun dalam konteks pesan moralnya, saya berharap setiap program kebijakan dan anggaran harus selalu berorientasi kepada tepat sasaran, tepat waktu, tidak delay, tepat anggaran, tidak membengkak, kemudian *stakeholder* di daerah dilibatkan, dan di ujungnya masyarakat dimana proyek-proyek itu dilaksanakan, betul-betul dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, Pak. Saya yakin dengan kepemimpinan Bapak semua itu bisa terlaksana.

Ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan, Pak, terkait ini apresiasi dan evaluasi. Apresiasi terkait kereta cepat yang sudah beroperasi ya, Pak, saya kaget gitu. Saya kira kita ada kesempatan naik kereta waktu itu dari Guangzhou ke Hongkong. Ternyata kita lebih cepat, kita lebih nyaman, kita lebih hening, keretanya ya, saya kira itu harus diapresiasi dan saya lihat kecepatan kita betul-betul di atas mereka. Tapi satu hal, Pak ya, saya berkali-kali sebenarnya mencoba itu, Pak, untuk bagian evaluasi. Ternyata akses menuju kereta cepatnya yang lambat, Pak ya. Jadi konektivitas menuju stasiun Padalarang terutama, itukan daerah padat, Pak ya, dan saya apresiasi juga dengan *on schedule* atau *on time*-nya kereta cepat. Saya seperti di film, Pak, baru sampai di stasiun Padalarang, saya melihat keretanya sudah berjalan, Pak ya, itu saya apresiasi malah, Pak. Tapi akibat apa itu? akibat akses menuju kereta cepatnya yang anomal, Pak, tidak bisa diperkirakan. Saya lihat di Google Maps, masih 10 menit, tapi menjelang dekat, saya tertinggal, Pak ya, itu saya kira itu menjadi catatan. Dan saya rasakan sendiri, Pimpinan, itu ternyata dari Padalarang ke Jakarta saya sempat 24 menit itu ternyata, luar biasa, saya malah datang kecepatan mau rapat di Jakarta. Saya pikir 40 menit, ternyata 24 menit, saya apresiasi, Pak.

Kemudian, Pak, saya mengingatkan juga tentang dampak operasi kereta cepat itu, itu harus diantisipasi, saya mohon maaf Pak, tidak dalam kapasitas mengajarkan Bapak, mengingatkan saja, Pak. Itu dampak dari beroperasinya kereta cepat, Pak, itu wilayah-wilayah yang terlintasi, Pak, tolong selalu harus dimonitor, Pak ya. Makanya *stakeholder* harus dilibatkan, jangan sampai wilayah-wilayah yang berdekatan dengan lokasi kereta cepat itu berkembang sedemikian rupa, akhirnya mengganggu, Pak, potensi keselamatan ke depan. Ya, saya kira harus jadi pemikiran dan arah kebijakan Bapak ke depan. Termasuk saya berharap, kalau misalnya betul itu akan dilanjutkan sampai Surabaya, maka *study demand*-nya harus *clear* dulu, Pak ya. Oke, misalnya sampai Surabaya, tapi sebenarnya komparasinya terhadap biaya dan waktu serta volume, ya, *wall factors* segala macam itu harus menjadi kajian yang sangat komprehensif, Pak. Kenapa? karena kita harus meninggalkan *legacy* terbaik buat generasi yang akan datang, Pak, jangan meninggalkan beban. Saya kira itu Pak, ini saya mengingatkan saja, Pak.

Nah, hiruk pikuk hebatnya kereta cepat, MRT dan seterusnya. Saya malah menawarkan, jika berkenan, Pak Dirjen Kereta Api, buatlah suatu *event*, gitu, untuk mengajak teman-teman Komisi V untuk merasakan penderitaan masyarakat Bogor menuju Jakarta, kalau subuh, Pak. Mereka nggak perlu berpegangan, Pak, sudah padat, pasti nggak akan jatuh, karena apa? Sudah tertahan. *Nah*, supaya menghadirkan kepekaan dan kita pikirkan bagaimana teman atau saudara-saudara kita yang dari subuh berjibaku, subuh Bojong Gede, kemudian Depok dan seterusnya. Kita, saya kira Pak Dirjen, undang kami lah perwakilan Komisi V untuk merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita.

Izin Pimpinan, karena sebenarnya keluhan ini terus menerus masuk ke saya. Karena seolah-olah, mohon maaf, sekali lagi, negara kenapa tidak ada solusi gitu? sampai kita nggak perlu berpegangan, itu di Tiktok itu banyak

banget itu, Pak, cerita-cerita serunya, Pak. Ya, belum lagi mohon maaf ya, potensi pelecehan seksual segala macam itu saya kira kita harus punya *treatment* yang kuat, Pak, disamping juga area-area parkir di sekitar stasiun juga akan mengganggu lalu lintas sekitar stasiun, Pak, ya sudahlah Bapak tahulah data-datanya. Itu yang terkait kereta, Pak, saya mohon izin untuk diingatkan.

Kemudian untuk darat, Pak ya. Ini banyak, Pak, pemukiman-pemukiman berkembang di wilayah Jabodetabek, Pak, dan itu menjadi potensi baru titik-titik macet baru, Pak ya. Saya Dapil Kabupaten Bogor, Pak, dengan gampang diakses oleh warga, kenapa? karena ada titik pengembangan pemukiman ternyata itu mengakses kepada jalan nasional maupun jalan provinsi itu menjadi titik macet baru. Artinya apa? Misalnya kebutuhan lampu merah atau kajian AMDAL dan seterusnya, yang tiba-tiba bisa dengan gampang, misalnya pembatas jalan dihilangkan, gitu, tanpa ada studi AMDAL, saling salahkan, oh itu dari Pemkot dan seterusnya. Akibatnya apa? sebagai contoh dulu, Pak, terjadi kecelakaan tanki truk yang *loss* rem itu banyak korban, sampai hari ini kita nggak dikasih tahu itu kajian dari Komisi Penyidikan Kecelakaan, kita nggak tahu itu sebenarnya seperti apa. Tapi paling tidak ini informasi ke kita, bahwa wilayah Jabodetabek itu sangat cepat perkembangannya tapi titik-titik macetnya semakin banyak. Maka harus ada roadmap bagaimana mengimbangi itu supaya apa? masyarakat tidak terjebak juga dengan pengembangan pemukiman, tapi ternyata mereka harus datang lebih subuh lagi.

Kemudian, Pak, mohon izin, untuk melakukan sinergi terhadap instruksi Presiden terkait jalan daerah, Pak ya. PUPR nya gencar merealisasikan usulan-usulan jalan daerah, tapi kemudian tidak diimbangi dengan rambu-rambu lalu lintasnya, yang akhirnya apa? kita kaget gitu, ada jalan bagus tapi ternyata kiri kananya jurang, rambu-rambunya kurang dan seterusnya. *Nah*, saya kira harus ada sinergitas, supaya apa, kalau misalnya jalan daerah memungkinkan untuk misalnya bekerjasama dengan Kemenhub, tentu dengan tetap memegang pada aturan Pak ya, paling tidak diinfo lah, Pak, barangkali ada bantuan dan seterusnya, kenapa? karena sekali lagi apapun judulnya itu semua adalah warga bangsa yang harus kita jaga, Pak ya.

Kemudian, Pak, udara. Saya apresiasi dan terima kasih atas keberanian untuk kemudian membuat keputusan menghilangkan polemik antara Husein dan Kertajati itu, saya kira perlu keberanian besar, Pak ya, maka saya apresiasi luar biasa, Pak. Akhirnya proyek Kertajati tidak menjadi proyek prasasti, Pak ya, karena terlalu mahal, triliunan, jadi prasasti. Tapi sekarang *alhamdulillah* menggeliat, Pak ya, bahkan banyak investor dalam tanda petik, ingin masuk ke wilayah sana. Dan artinya optimalisasi investasi kita bisa maksimal dan terpenting pelayanan terhadap komunitas penerbangan kita semakin tersebar, Pak, dan itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, Pak.

Namun demikian, kami juga meminta tetap bandara-bandara yang ditinggal, Pak, kalau perlu, Pak, mohon izin. Yang selama ini kerja sama

dengan lapangan-lapangan militer, Pak, itu dibuat *roadmap* untuk kemudian ada *time table*-nya kapan kita akan mandiri, Kementerian Perhubungan punya sendiri tanpa harus menggunakan lapangan-lapangan milik TNI, Pak ya, ini sudah sangat keren buat saya ini, Pak Menteri luar biasa.

Kemudian Pak terkait laut, Perhubungan Laut. Saya beberapa kali punya kesempatan untuk melihat dermaga-dermaga atau pelabuhan-pelabuhan, Pak. Saya kira itu harus juga dilakukan audit, Pak ya. Saya terakhir saya sudah pernah suarakan terkait dermaga dimana itu, Gili Trawangan, Pak. Ya itu mohon maaf, buat saya tidak mencerminkan bahwa itu adalah destinasi kebanggaan nasional ya, ruang tunggunya masih di warung-warung, karena yang sudah ada pun tidak maksimal, belum lagi fasilitas pelabuhan atau dermaganya tidak optimal saya kira.

Saya kira itu saja, Pimpinan. Terakhir saya kira penutupnya hanya mengingatkan saja, tentang pentingnya IKN karena investasi yang sudah dikeluarkan negara sudah begitu besar. Saya harap sinergitas Kementerian Perhubungan dengan kementerian lain bisa maksimal, Pak, termasuk tentu mobilitas manusia akan meningkat di IKN. Maka bandara kita harus bandara yang membanggakan, Pak, karena IKN-nya membanggakan pasti etalase negaranya itu diperlihatkan di bandaranya ke depan.

Itu saja Pimpinan, terima kasih. Salam hormat untuk semua, sehat selalu, *bismillah* terus memberikan dedikasi terbaik buat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Makasih, Pak Mul.

Ini narasi Pak Mul ini sudah pasti ngecor korupsi di DPR ini, bagi-bagi, Pak Mul, Bogor-nya. Sama Adian Napitupulu kalau di PDI Perjuangan, Pak.

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Dari meja....

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Saya interupsi sedikit.

F-PG (ILHAM PANGESTU):

Sedikit, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Sebentar, sebentar. Pak Ilham dulu, Pak Syarif dulu?
Ya, Pak Syarif dulu, silakan, habis Pak Syarif ini, Pak.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Iya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya cuma teringat, karena ini juga penyampaian dan juga Pak Ketua juga mengetahui. Terutama berkaitan dengan kebijakan terhadap bandara yang bukan *hub*, Pak, *nah*, itu dampaknya kepada bandara kami di Kalbar. Karena tadinya Kalbar itu ada berapa penerbangan internasional seperti Malaysia, Singapore, Kuching. Akibat karena dianggap tidak *hub* itu penerbangan internasional ditiadakan.

Nah, ini saya mohon, karena ini Kalbar ada berkaitan Sosek Malindo, sehingga Kalbar pada waktu itu juga dibuka sebagai penerbangan internasional. Dan ini juga merupakan aspirasi masyarakat Kalbar dan ini sangat merugikan, Pak, terutama untuk Kalbar. Yang tadinya teman-teman saudara-saudara kita dari Serawak-Kuching, kemudian juga ada yang Malaysia-Kuala Lumpur, karena ini juga merupakan banyak juga pekerja-pekerja kita di sana dan juga banyak juga masyarakat yang disana berkunjung di Kalbar, dengan ditiadakan ini jadi persoalan.

Nah, saya mohon untuk kebijakan ini dilihat daripada sisi Sosek Malindonya. Dan ini juga Kalbar merupakan daerah perbatasan yang diberikan sedikit spesial ya untuk itu. Jadi, saya ini mohon perhatian lah, khusus untuk Kalimantan Barat ini, terutama penerbangan ke Kuching ini yang bertetangga ini untuk tidak ditutup, Pak, diberikan dispensasi itu.

Yang kedua, ah ini kebetulan ini berapa kali saya ini selalu ditanya ini, Pak, kebetulan kita rapat pada saat ini kebetulan Pak Boy di samping saya ini. Berkaitan dengan masalah Kayong, Pak Boy nanya, gimana kelanjutan Kayong tuh? *Nah*, saya bilang katanya Pak Boy yang tidak setuju, kata Pak Menteri, ini, Pak.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Ini tahun politik, ini fitnah ini, Pak.

F-NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Tapi Pak Boy bilang, *ndak, ndak* bener tuh, kau tanyakan. Jadi dia bilang, Pak, ini minta ketegasan saja. Karena begini, pemerintah daerahnya ini mungkin pemerintah daerahnya mendengar lagi, nih, ya sudah membebaskan lahan, berkaitan dengan itu, karena waktu itu juga diberikan lampu hijau oleh Kementerian Perhubungan. Ini juga ditegaskan, kalau memang kebijakan itu

tidak diteruskan, dijawab secara tertulis, karena berhubung dengan mungkin kebijakan, apa, dan sebagainya supaya ada dasar pemerintah daerah. Kita takut nanti juga mereka ini sudah membebaskan tanah terjadinya itu tidak dilaksanakan bandara itu tidak terlaksana, ini kan juga bisa menjadi temuan di kemudian hari.

Nah, ini tidak semudah itu, karena ini menggunakan dana APBD. Saya kira ini perlu, soalnya tadi Pak Boy ini nanya saya lagi, maka sebenarnya saya tidak ingin bertanya ini, tapi Pak Boy nanya bagaimana pelabuhan Kayong, kok ndak dilanjutkan? Saya bilang Pak Menteri waktu ketemu, saya suruh kompromi dulu dengan Pak Boy, katanya Pak Boy ndak setuju, eh ndak ada saya bilang, gitu, dia bilang. *Nah*, jadi saya kira mohon ketegasan dari Pak Menteri.

Saya kira itu saja, Pak.

Terima kasih.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Interupsi, Ketua.

Ini berkaitan masalah setuju tidak setuju.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Nah, kalau mau kelahi, di luar, jangan di dalam.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Ini ada videonya, Ketua, ada videonya, saya satu Dapil.

Sebenarnya ini persaingan tidak sehat. Sebenarnya berkaitan dengan masalah bandar udara di Kayong Utara, sayalah sebenarnya, Pak Menteri tahu yang berjuang, bagaimana bandara itu agar terealisasi. Cuma karena Pak Syarif ini barangkali ada sedikit kurang *mood* dalam berjuang, tidak melakukan evaluasi yang baik dan benar, berkaitan dengan bandara Kayong, saya pikir, ya seperti itu.

Yang jelas, Pak, saya selalu ngomong dengan Pak Syarif, saya katakan yang jelas, kita minta kepada pemerintah agar ada status kejelasan berkaitan dengan masalah bandara di Kayong Utara, agar masyarakat di sana maupun pemerintahannya, artinya paham tentang status ini. Jadi saya ralat, tidak ada saya mengatakan bahwa saya tidak setuju dibangunnya bandara di Kayong Utara. Itu ralatnya Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, saya menanggapi dulu.

Satu kata saja, Pak, selamat berkompetisi.
Silakan Pak Ruslan.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Ndak, ndak bukan kompetisi Ketua, supaya jelas.
Soalnya Pak Boy nanya saya, Pak, saya *ndak* ada, *ndak* setuju, dia bilang, Pak Menteri kemarin bilang gitu, Pak Boy ya, kau klarifikasi, gitu.

F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Selesaikan secara kekeluargaan saja, Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya oke nanti di ruang makan kita selesaikan.

Silakan Pak Ruslan silakan.

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pak Ketua dan seluruh para Pimpinan,
Dan para Anggota yang kami banggakan,
Bapak Menteri dan seluruh jajaran beliau yang hadir pada hari ini yang kami muliakan,

Izinkan Bapak Menteri untuk mengingatkan, saya yakin Bapak Menteri yang sangat kami banggakan, yang kami muliakan, sesuai dengan kunjungan reses Komisi V ke Provinsi Aceh, Dapil Aceh II tempatnya adalah di Lhokseumawe, di bandara Malikusalleh dan juga Kunker Bapak Menteri sendiri di bandara Malikusalleh beberapa bulan yang lalu. Kita sepakat yang, bahwa bandara itu perlu kita lengkapi, baik di segi *runway*-nya dan juga pengamanan, yaitu pagarnya dan juga terminal. Pada saat itu Bapak Menteri sudah melihat secara langsung ke Provinsi Aceh, tentunya di tepat terminal Malikusalleh itu tersebut.

Tapi faktanya pada hari ini yang saya baca dan saya lihat atas paparan tadi, ini belum terakomodir. Dan di saat rapat-rapat yang terdahulu, itu ada wujudnya, tapi hari ini kok nggak timbul kembali. Itu perlu di apa, dilihat secara menyeluruh dan juga kita berbicara dalam konteks keadilan, Bapak Menteri. Sebab Provinsi Aceh, kalau saya lihat, saya baca di sini, ini sangat sedikit program tahun 2024. Moga-moga pada hari yang sangat berkah ini, saya yakin Bapak Menteri, kita doakan sama-sama supaya Bapak Menteri bisa mengabulkan permohonan kita, dan juga sudah Bapak Menteri sendiri lihat di lapangan dan juga Kunker, ataupun kunjungan reses Komisi V, pada saat itu dipimpin oleh salah seorang, Pimpinan. Tetapi pada saat itu adalah berhalangan, diwakili oleh Bapak Eddy Santana yang sudah disampaikan tadi.

Mungkin itu saja Pak Menteri. Mohon kebijakan dan kebijaksanaan Pak Menteri dapat terakomodir pada tahun 2024.

Sekian dan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Walaikumsalam.

Makasih, Pak Ruslan Daud.

Selanjutnya Pak Ilham.

F-PG (ILHAM PANGESTU):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Pak Menteri beserta jajarannya,

Pertama-tama, saya mengapresiasi hasil kerja Kementerian Perhubungan pada tahun 2023. Tadi saya sudah baca tentu dari hasil tahun 2023 angka kecelakaan itu berkurang dari darat, laut dan udara. Ini tentu bagaimana kinerja dari Kementerian Perhubungan sangat fokus untuk bangsa dan negara.

Yang kedua, ada beberapa kegiatan di Aceh yang dapat perhatian dari Pak Menteri, ucapan terima kasih kepada masyarakat Aceh, kepada keluarga besar Kementerian Perhubungan. Tentu tadi sisa anggaran tadi 11,32 triliun dengan waktu sisa 2 bulan. Saya cuma menyarankan, Pak Menteri menggunakan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 109 Tahun 2023, mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Saya mendukung kepada Kementerian

Perhubungan untuk menggunakan sisa anggaran pada tahun 2023 ini dan saya yakin pada akhirnya di bulan 12, Kementerian Perhubungan dapat menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Ilham.

Selesai sudah dari meja Anggota.

Saya persilakan dari meja Pimpinan, Pak Ridwan silakan.

F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Terima kasih.

Pak Ketua, Pak Roberth,
Anggota Komisi V yang terhormat,
Pak Menteri dan seluruh jajarannya,

Satu saja, Pak Menteri, saya, kebetulan ada Pak Dirjen di sini ini, Pak Dirjen Darat. Hari Sabtu itu 11 November ya jam 08.30, saya ada undangan launching di ke penyebrangan Sawa Patani dari pelabuhan rakyat Sawa Patani Kecamatan Wawonii Selatan. *Launching* penyebrangan perdana ferry Sawaea pelabuhan itu ya.

Yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri adalah di sana itu sebenarnya pelabuhan laut yang dibikin oleh dengan dana desa, dana desa. Lalu kemudian ferry-nya sudah ada dari ASDP, kemudian ASDP itu sudah dapat juga sekarang subsidi dari Kementerian Perhubungan, sudah dapat untuk operasionalnya mungkin.

Cuma barangkali yang saya ingin saya sampaikan, adalah persoalan pelabuhan ferry-nya, karena kapal ferry yang ada disana tidak bisa sandar kalau muat mobil. Karena mobilnya itu dia menyamping jadi tidak bisa naik mobil, Pak, *ndak* ini, apa namanya, tidak ada pelabuhan laut lah yang dipakai sekarang ini yang ada di sana, Pak. Saya tidak tahu istilah-istilah apa soal ferry itu.

Nah, menurut saya kalau bisa tahun 2024 ini ada penganggaran itu, kalau anggaran sudah terbagi semua, saya yakin akan ada sisa-sisa lelang tahun 2024 itu. Jadi mungkin barangkali melalui Pak Menteri, juga Pak Dirjen Darat sudah dengar juga agar ini bisa diprioritaskan penganggarnya melalui sisa-sisa tender yang tahun 2024.

Itu saja, Pak Menteri.

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Makasih, Pak Ridwan.

Pak Roberth, silakan.

F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Saudara Menteri dan seluruh Dirjen dan Eselon I dan II yang hadir yang saya hormati,
Hadirin yang berbahagia,

Pertama, Pak Menteri, saya coba ingin sesuai topik kita evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023, saya memberikan beberapa catatan terhadap evaluasi.

Yang pertama, terhadap penyerapan anggaran yang tadi juga sudah disampaikan teman-teman yang masih belum kecapaiannya belum baik, maka kami mohon untuk Saudara Menteri dan jajaran agar ini bisa dikejar lagi agar betul-betul target pencapaian penyerapan anggaran ini bisa sesuai target.

Yang berikut tentang PNBPN. Saya kira pencapaian untuk menuju target sangat baik ya, ini realisasi PNBPN-nya ya salah satu yang terbaik di pemerintah adalah Kementerian Perhubungan, kami memberikan apresiasi.

Yang berikut catatan kami untuk evaluasi.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada Dirjen Kereta Api. Kemarin kami lihat Bapak Presiden sudah dengan bangganya mengekspos tentang kecapaian keberhasilan dari mulai KRL Jabodetabek itu sampai kereta cepat. Kami bangga dengan hasilnya, walaupun yang namanya kereta cepat itu meninggalkan masalah yang besar. Kita tahu berapa besar hutang negara untuk membangun itu, untuk mengembalikan itu, kita harus cicil ratusan tahun mungkin baru bisa selesai, dan itu masalah, tetapi hasilnya ya sudah bisa dirasakan. Kita lihat KRL juga bagaimana Presiden mengekspos itu, tapi tiba-tiba ada masalah di dalam konstruksi yang harusnya bisa jalan dengan kecepatan sekian, akhirnya tidak bisa di beberapa lokasi.

Saya kaget lagi, lebih kaget lagi kemarin, begitu saya lihat di TV, hujan yang baru sebentar saja itu ada stasiun yang banjir air dari atas, ini apa ini? Ini

baru saja, Pak Menteri, diresmikan, ya kan, keluar di media, ini proyek baru selesai kok, baru hujan sehari, ini baru, belum masuk ke musim hujan, itu sudah lihat plafonnya jebol, airnya turun kayak air bah dari atas, ini apa ini ya kan. Sedangkan kita tahu anggaran itu yang tadinya cuma berapa, ada pembengkakan anggaran di situ begitu besar, tapi kualitas pembangunannya kayak begitu.

Ya, saya ingin minta kepada kita semua, Ketua, melalui Ketua, kita bisa pengawasan Kunsfik spesial untuk melihat itu. Karena ini kami yang menyetujui anggarannya tapi hasilnya seperti itu maka harus ada pengawasan untuk menjadi catatan penting, ya kan, kami minta untuk bisa pengawasan juga dari aparat terkait yang membawahi itu, ya kan, berarti ada penyalahgunaan di dalam pembangunan, maka itu bisa terjadi seperti itu, ya kan. Ini proyek baru kok, baru diresmikan, kok bisa terjadi seperti itu. Dan bicara tentang kereta api nih banyak masalah, Pak Ketua, jadi kita harus lebih fokus lagi. Tadi kita lihat serapan anggaran masih belum banyak dan hampir besar juga masih ada di kereta api untuk serapan anggaran.

Untuk itu saya usulkan, Ketua, supaya kita harus bisa evaluasi setiap saat, juga untuk mengenai serapan anggaran ya. Kalau memang itu ya kan, saya kira saya terima kasih kepada Ketua bahwa ini bukan cuma di komisi kita, tapi ada juga di komisi yang lain. Itu pemerintah melalui menteri terkait minta untuk pemindahan anggaran dari beberapa eselon untuk dipindahkan di satu ini, ya kan. Tetapi Ketua menolak itu, dan saya terima kasih Ketua sudah melakukan itu, dan memang kita harus menolak, karena kita tidak ada membahas di sini. Dan itu semua yang kemarin saya pernah menyampaikan bahwa usulan pemerintah, komisi ini bisa menisir untuk sesuai dengan kebutuhan bisa dipindahkan dari satu Dirjen ke Dirjen yang lain, sesuai dengan kebutuhan yang menurut kita, komisi, bermanfaat untuk masyarakat di Dapil-Dapil kita.

Jadi, saya kira itu buktinya, bahwa itu bisa kita lakukan. Dan saya terima kasih, Ketua, bukan cuma Kementerian Perhubungan, tapi Kementerian PUPR pun juga melakukan itu. Kenapa itu harus dilakukan? karena sejarah pemerintah, kita lihat begitu memperhatikan penuh kepada pembangunan IKN, maka hampir semua anggaran itu tertuju ke sana. Mohon maaf saya harus sampaikan juga. Kemarin saya pun dikasih tahu, bahwa apa yang sudah kami bahas 2024 untuk program aspirasi yang di daerah kami, yaitu ada beberapa landasan terbang yang kami minta untuk ini dan itu kemarin sudah ada, tiba-tiba saya mendapat laporan, itu dihilangkan.

Ternyata semuanya itu dilakukan karena untuk mendukung IKN. Mohon maaf, Pak Menteri, saya mohon agar yang kecil-kecil yang seperti ini, tolong jangan juga dicabut ya. IKN akan berjalan, ya sesuai waktu, saya kira, tidak perlu terlalu kita mencemaskan itu ya, sudah dicanangkan oleh Presiden dan akan dilanjutkan oleh Presiden berikutnya. Tapi bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil untuk semua bangsa ini mendapat perhatian. Jangan cuma satu proyek, kita korbakan juga masyarakat-

masyarakat di daerah yang sangat membutuhkan kehadiran pemerintah di daerah-daerah, khususnya di daerah kami.

Yang berikut, saya ke Dirjen Darat, tadi juga teman-teman sudah disampaikan. Kami masih bermasalah dengan program yang katanya aspirasi untuk Anggota, untuk PJU ya. Ini sampai sekarang belum jelas, Pak Dirjen. Kami rapat terakhir Pak Dirjen jamin nanti akan berkoordinasi dengan Bappenas, karena syarat-syarat yang diberikan itu kalau itu kita harus memenuhi syarat-syarat itu maka tidak ada manfaatnya tentang aspirasi yang kami bawa ke daerah melalui penerangan jalan umum. Karena masyarakat yang membutuhkan itu ada di dalam desa-desa ya kampung yang sangat membutuhkan itu. Kalau itu kita taruh di jalan nasional ya itu ada di luar, masyarakat di daerah-daerah kami saya kira semua ada di dalam lingkungan kampung dan desa.

Jadi, mohon Pak Dirjen, sekali lagi ya, agar betul-betul ini bisa bermanfaat untuk kita, Anggota. Dan khusus ditempat saya atau di Dapil Papua, Pak Dirjen, ini saya mengecek langsung, entah staf saya kepada balai kita yang ada di Papua, tapi dikatakan semua sudah selesai dikoordinasi dengan Saudara Taufik. Apakah program ini untuk manfaatnya Saudara Taufik? kan ini untuk manfaatnya kami yang di Dapil untuk masyarakat yang kami sudah datang ke daerah, bagaimana kami berkomunikasi dengan mereka, ya kan. Yang dimaksudkan itu apa itu, gitu? semua sudah selesai dengan Bapak Saudara Taufik, selesai itu apa, Pak, kami tanya. Tidak ada embel-embel di dalam kami memberikan lampu ini, itu semua kami berikan dan kami sosialisasikan, bahwa tidak ada embel-embel, itu berikan gratis semuanya kepada Masyarakat, gitu. Jadi, kami tegaskan sekali lagi semua program yang kami lakukan ini demi untuk masyarakat di daerah pemilihan kami sesuai dengan sumpah kami di dalam jabatan kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang berikut Dirjen Darat. Kami juga ada usulkan untuk pelabuhan ferry di daerah kami, yaitu di Kepulauan Yapen, yaitu mohon juga penjelasan, sampai dimana masalah-masalah yang masih kendala?. Karena menurut kami kemarin semua lahan dan administrasi yang dibutuhkan semua sudah kami lengkapi. Maka kami mohon ini juga bisa dapat terlaksana, agar apa yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat di daerah itu maka masyarakat menghibahkan lahan itu dengan cuma-cuma kepada pemerintah, karena semangat untuk bisa membangun daerahnya, keterbukaan di daerah itu, maka masyarakat itu memberikan lahan kepada pemerintah. Jadi, ini menjadi harapan kami.

Yang berikut, Pak Dirjen Darat, tentang bis juga. Bis ini yang lain sudah jalan, kami sampai saat ini belum jelas, kapan kami bisa menyerahkan itu, kami baru reses dari daerah, dipertanyakan di sana ya, terhadap program bis yang sudah kami sosialisasikan.

Yang berikut lagi, Pak Dirjen Darat, ini sejak tahun 2020 kami usulkan ini. Kami usulkan untuk bis bantuan untuk ada 39 trayek di Kabupaten

Jayawijaya. Ya, itu karena pernah terjadi konflik sosial di sana, tahun 2019 itu bis-bisnya terbakar, maka kami usulkan bisa bantuan 10 unit bis untuk bantuan terhadap 39 trayek yang ada di Kabupaten Jayawijaya, sampai saat ini belum juga terakomodir. Kami mohon untuk bisa dapat tanggapan dan perhatian serius dari Pak Dirjen Darat ya, untuk bisa realisasi ini ke depan.

Yang berikut, kami lanjut ke Dirjen Laut. Pertama, kami ucapkan selamat Pak Dirjen Laut sudah tidak lagi Plt, Pak Menteri, terima kasih. Saya kira, Pak Antoni, kami sangat *respect*, karena beliau baru jadi Plt dan sangat respon terhadap Anggota, apa yang kami sampaikan kami ini, beliau respon memberikan masukan maupun tanggapan dan penyelesaian masalah-masalah yang kami sampaikan. Terima kasih untuk Pak Antoni ya, Dirjen Laut yang baru kami.

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk Pak Dirjen Laut, walaupun beliau baru masuk. Yaitu kemarin kami ada usulkan terhadap rehabilitasi galangan kapal di distrik navigasi Jayapura, itu tidak terlalu besar anggarannya. Saya kira ini perlu nanti Pak Menteri bisa menjadi perhatian karena anggarannya cuma ya sekitar 4 atau 5 miliaran rupiah gitu. Saya kira ini bisa menambah PNBK di sana karena terus terang saya waktu berkunjung di sana juga itu disampaikan saudara-saudara kami dari PNJ itu kalau perbaikan kapalnya itu masuk ke sana. Tapi sayang tidak bisa diangkat ke atas karena dibutuhkan yang tadi anggaran cuma sekitar segitu untuk bisa membeli relnya untuk dinaikan ke atas. Jadi saya kira sangat kami butuhkan itu. Dan ada beberapa lagi yang bisa diberikan untuk, karena di situ ada terdapat fasilitas *docking* besar ya, KM Aldebaran itu lokasinya sama di situ. Saya kira itu peninggalan Jepang, eh peninggalan Belanda yang sangat baik ya, pelabuhannya dalam, ya kan, lokasinya strategis, ya kan. *Nah*, kita tinggal bagaimana *nge-renov* sedikit untuk bisa ini dapat dioperasionalkan sepenuhnya, karena saya melihat fasilitas-fasilitas bengkelnya apanya semuanya sudah baik dan itu peninggalan dari Belanda.

Yang berikut, Pak Dirjen Laut, sebagai daerah yang sangat tertinggal dan sangat terluar. Kami di sana perlu untuk konektivitas yang namanya tol laut dan angkutan perintis yang di sana. Ada beberapa pelabuhan, sehingga baru yang saya kemarin sudah usulkan, Pak Dirjen Laut, mohon nanti dilihat kembali ya, yaitu ada penambahan, saya usulkan, penambahan-penambahan untuk pelabuhan singgah atau trayek baru di Kabupaten Nabire. Misalnya di Teluk Umar, Yeretuar dan Kwatisore, pesisir utara pelabuhan pangkal di Sorong, itu. Jadi ada lagi penambahan pelabuhan singgah trayek baru atau perintis yaitu di Dokis, Wapoga, Moor, Mambor dan Wainami serta di Nabire, itu yang tadi sudah ada Kwatisore dan Teluk Umar pelabuhan pangkal di Biak. Ada penambahan lagi di usulan penambahan singgah trayek baru, yaitu di Agats, Jita, Agimuga, Poumako dan Kokonao. Jadi, saya kira daerah-daerah ini sangat membutuhkan, karena daerah-daerah itu sampai saat ini masih sangat terbatas angkutan lautnya. Mohon nanti menjadi perhatian Pak Dirjen Laut yang baru.

Yang berikut nanti, Pak Dirjen Udara, karena Ibu Dirjen tidak ada, tetapi terima kasih Pak Menteri, Ibu Dirjen sangat respon apa yang kami sampaikan dan mohon dukungan Pak Menteri juga melalui Ibu Dirjen, untuk beberapa program yang sudah kami sampaikan, untuk bisa mendukung apa yang sudah juga disampaikan oleh Pak Willem tadi. Karena memang daerah-daerah kami yang di pegunungan itu sangat membutuhkan angkutan udara. Kalau tidak ada itu, sama saja kita menyusahkan masyarakat di sana, karena tidak ada jalan lain, kalau jalan kaki bisa berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan baru sampai ke ibukota, kabupaten nya.

Jadi, itu yang menjadi catatan kami. Sekali lagi Saudara Menteri, kami sangat berterima kasih atas dukungan program-program yang sudah berjalan. Dan kami ingin juga harapan kami untuk bisa Pak Menteri memberikan dukungan juga kepada program-program yang sudah kami sampaikan di dalam RAPBN 2024, agar kehadiran kami di sini bersama Pak Menteri untuk bisa dapat memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat kami yang ada di pelosok paling timur Indonesia ini, yang betul-betul sangat membutuhkan dukungan kehadiran pemerintah pusat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kami yang ada di sana. Sekali lagi kami terima kasih kepada Pak Menteri dan jajaran semuanya atas kerjasama kita.

Yang berikut, saya lupa satu Dirjen ini, karena harus melalui Pak Menteri untuk ada kebijakan optimalisasi terhadap kemahalan tiket yang...karena teman-teman di kami yang paling berasa kalau ada kenaikan tiket karena selisih kami itu sangat mempengaruhi, karena dasarnya saja kami sudah tinggi, Pak Menteri.

Kemarin saya pulang itu tiketnya itu, saya naik Garuda, kalau saya naik Garuda itu bisa 16 sampai 18 juta sekali jalan saya pulang, *nah*, itu. Jadi ini menjadi catatan juga bagi kami, tolong Pak Menteri bisa bagaimana kita agar selisih harga tiket itu tidak terlalu tinggi ya. Kita harap kita melalui pesawat kebanggaan penerbangan kita, BUMN kita, tapi kita lihat selisihnya terlalu jauh dengan perusahaan swasta yang ada. Jadi itu yang buat kami agak kecewa juga, kita ingin naik Garuda nggak bisa. Jadi mohon perhatian Pak Menteri sekali lagi.

Terima kasih, Pimpinan, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf agak lama Ketua, tapi karena sudah lama tidak ketemu Pak Menteri, ya inilah yang bisa dapat kami sampaikan, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya kembalikan, Pimpinan.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Pak Menteri, mungkin saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.

Pertama soal kereta cepat, Pak. Saya minta kita sebagai regulator ya mengawasi ya betul operasional kereta cepat ini, memang kita masih bisa memaklumi ditahap awal ini ada banyak penyesuaian-penyesuaian, karena ini barang baru. Namun demikian, ini perlu kita cermati, Pak, ada apresiasi tapi ada banyak juga keluhan yang nyampai ke Komisi V. Jadi kita tidak campur soal bisnisnya, karena tidak ada domain Komisi V di situ. Kami hanya mengawasi terkait dengan pelayanan saja, karena pelayanan tentu bagian dari kita dan pengawasan itu juga bagian dari kita karena dibawah naungan regulasinya di bawah naungan Kementerian Perhubungan.

Yang kedua LRT, Pak. LRT ini juga ada banyak keluhan ke kami juga terkait LRT terutama juga soal apa namanya *connectivity* antar modanya, Pak ya, turun di mana, naik di mana, itu ya ini juga ada banyak dikeluhkan oleh masyarakat ke kami ke Komisi V. Bahkan hal-hal teknis pun disampaikan ke sini, bahwa ada kemarin informasi kami dapat, saya sendiri diwawancarai oleh pers, terkait cepat hausnya dia punya roda, Pak.

Karena ini menyangkut keselamatan, saya pikir ini juga sebagai regulator, sebagai pengawas Kementerian Perhubungan, kami titip pesan untuk secara seksama memperhatikan hal-hal teknis yang terkait dengan kenyamanan dan keselamatan, Pak ya, kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengguna baik khususnya yang baru ini yaitu kereta cepat dan LRT, ya demikian juga yang lain-lain.

Kemudian yang ketiga, ingin saya sampaikan terkait dengan soal PNBPN. Ya, PNBPN ini menjadi isu yang banyak juga ditanyakan ke kami ya. Saya juga sebagai Pimpinan bersama seluruh Anggota, Pak, pasti kami mengapresiasi kerja keras Kementerian Perhubungan ya, terkait dengan kemampuan Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan manajemen ya, kinerja terkait dengan raihannya, capaian, perolehan PNBPN kita di Kementerian Perhubungan di semua sektor lah, yang memang ada PNBPN-nya. Yang banyak disampaikan ke kami, sorotannya itu adalah soal di laut, Pak ya. Laut ini, Pak Dirjen selamat, kita boleh kasih tepuk tangan lah buat Dirjen Laut yang baru ini ya.

(PESERTA RAPAT BERTEPUK TANGAN)

Mudah-mudahan tepuk tangan kita ini bisa menyemangati Pak Dirjen Laut yang baru ini ya, masih muda juga untuk bisa bekerja lebih, kalau bahasa sekarang itu sat-set, Pak, sekarang bisa lebih cepat ya sat-set, sat-set ya. Pak Tamanuri jangan bilang lagi saya ada di sana ya, oke.

Nah, jadi saya bilang memang capaian kita di laut ini gede, Pak, bagus ya, tapi juga apakah potensi yang sudah ada nih kita sudah petakan secara maksimal, karena itu pertanyaan yang banyak di kami. Jadi, tugas Pak Dirjen yang baru untuk memetakan seberapa besar potensi yang sudah diambil dan seberapa besar potensi yang masih bisa kita maksimalkan, gitu loh, tadinya

komisi ini sudah sepakat, Pak, mau ngebentuk Panja soal ini. Jadi kita mau perdalam terkait dengan PNBP ini, tapi kami beri kesempatan dulu itu kesimpulan rapat internal kita dulu, kita beri kesempatan kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan elaborasi ya secara maksimal. Tentu kami yang ada di Komisi V ini hampir semuanya punya Pelabuhan, Pak, hampir semuanya ada pelabuhan di daerahnya dan banyak aktivitas-aktivitas baik yang sudah di pelabuhan resmi ya, atau pelabuhan umum atau pelabuhan Tersus yang sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan, berizin maksud kita, ada juga pelabuhan-pelabuhan yang tidak berizin, Pak, tapi beroperasi.

Ini tentu tantangan bagi kita, Pak Menteri ya, memang tidak mudah. Dengan panjang pantai kita yang sekian juta kilometer itu, dengan sekian ribu pegawai Dirjen Perhubungan Laut ya, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, Pak. Ini pekerjaan yang berat ya diperlukan kerja keras dan yang paling utama adalah integritas, Pak, ya integritas Bapak-Bapak dipertaruhkan di sini. Ketika ada godaan dan seterusnya, sudahlah, Pak, kami boleh lewat sini saja yang penting begini-begini. Oh, saya ini orang lapangan, Pak. Kita kalau ke daerah naik *speed*, singgah di dermaga-dermaga yang umum, singgah di dermaga khusus dan singgah di dermaga yang abu-abu, Pak ya. Jadi kita sudah pernah singgahi semua. Cara kerja kita ya seperti kerja intelejen, Pak, paham kita barang beginian ya. Jadi kami memberi kesempatan sepenuhnya kepada Pak Antoni ini ya, Pak Menteri, Pak Antoni yang dikasih tugas baru sebagai Pak Dirjen ya.

Kemudian soal perizinan, Pak Dirjen, Pak Menteri, ini soal perizinan-perizinan di perhubungan, segala sektor lah, termasuk di laut ya. Ini kita yang sifatnya investasi ya, tolong, Pak, dibantu dipercepat, gitu loh. Ini kami sendiri mengalami ini banyak hambatan, banyak kendala ya, mungkin nanti kalau kita sudah bentuk Panja dan seterusnya ini merupakan sekalian bahan yang akan kita elaborasi di dalam Panja itu, tapi nanti, Pak,

ini menjelang Pemilu ini kelihatannya energi kita nggak cukup ini ya. Jadi kita kasih kesempatan dulu kepada kementerian untuk melakukan elaborasi memaksimalkan kinerja disektor ini. Ya, kami menghormati dan menghargai sekali lagi, Pak Menteri, kerja kerasnya Bapak-Bapak ini sudah mengawasi negara begini luas dikasih tugas suruh nyari duit lagi, Pak Menteri ini, sudah gitu, mau gunakan duit nggak boleh lagi, Pak Menteri yang nyari yang lain yang menggunakan.

Jadi harusnya dari PNBP saja kemarin urusan bandara itu beres mestinya, Pak Menteri ya, tidak perlu kita berdebat tetapi Bapak tidak dikasih keleluasaan, ini juga mana Pak Syarif tadi nih, aduh Pak Syarif sudah pergi lagi. Pak Hamka tolong dong disampaikan di Badan Anggaran, tuh ya, supaya teman-teman yang pemungut PNBP ini diatur lebih bagus gitu loh kewenangan dalam konteks penggunaan, mereka yang berdarah-darah memungut, terus digunakan oleh pihak lain, gitu loh. Jangan-jangan digunakan bukan untuk mensejahterakan sektor perhubungan, mungutnya dari Perhubungan dibangun ke tempat lain. *Nah*, ini tugas teman-teman Banggar lah ya, kalau Pak Menteri ini nggak mungkin berani ngomong banyak, Pak, nanti sama

Menteri Keuangan dipersulit lagi. Ya jadi kita bantu, Pak, kementerian ini supaya kita tugaskan, tapi kita tolong juga, gitu loh, jangan ngasih tugas saja, nggak dibantu.

Ya, kemudian saya rasa itu yang umum, Pak. Sekali lagi Pak Antoni yang bersifat investasi itu didorong, Pak, perizinan itu dipercepat, hambatannya dimana, gitu loh, ini orang berinvestasi, Pak ya, kita bantu prosesnya kita percepat. Ini sekarang gini hari kan Presiden selalu menggaung-gaungkan proses perizinan yang cepat, tapi tepat, Pak ya, jangan cepat tidak tepat, ini juga masalah nanti ya, cepat tapi tepat, gitu loh yang sifatnya investasi harus kita dorong, Pak ya, membantu Kementerian Perhubungan memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan dan seterusnya, sehingga seluruh potensi ini nanti bisa kita maksimalkan. Karena menurut saya investasi di sektor perhubungan ini adalah juga sumber pendapatan bagi negara, Pak ya.

Kemudian saya ke Dapil, Pak Menteri. Saya menyambung apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman dari Kalimantan Barat ya. Beberapa waktu lalu saya memimpin kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, saya ditemani oleh direktur bandar Udara, Pak Menteri, kemarin, Pak Samsu ya, kemarin, sudah diganti saya lihat ya. Beliau sudah tak titipi pesan sama saya kemarin, bahwa bandara Pontianak, bandara Supadio Pontianak itu sekarang status internasionalnya kan dicabut ya, tidak boleh lagi melayani penerbangan internasional.

Saya minta kepada kepada gubernur bikin surat, Pak Gubernur sudah bikin surat, Pak, mudah-mudahan ini juga sudah sampai ini. Tujuannya ke Kementerian Perhubungan, tapi kami dapat tembusan Pak Menteri, dari surat Pak Gubernur ada di tangan saya ya. Saya bilang sama Pak Gubernur, tolong kalau internasionalnya dibuka, pertanyaan saya ada maskapai yang mau terbang nggak ke situ? Jangan internasionalnya kita buka, terus maskapainya nggak ada yang mau terbang. Nah, akhirnya saya ketemu lah dengan maskapai, Pak, Lion Grup, kemudian AirAsia dan Citilink lah, tempo hari, ada tiga perusahaan penerbangan yang katanya sekarang sudah mengajukan, tapi karena statusnya tidak lagi internasional.

Dulu dari bandara Supadio Pontianak ini, orang terbang ke Kuala Lumpur terbang, ke Singapore kemudian Kuching, Pak, ini dulu rutin setiap hari, nah, sekarang tidak bisa. Ya, ini ada beberapa alasan, saya tidak perlu bacakan satu per satu surat ini, pasti Pak Menteri pasti sudah terima sebagai bahan pertimbangan ya. Saya ambil salah satunya saja poinnya, Pak, adalah masukan dari *Association of the Indonesian Tourism and Travel Agency* (ASITA) ya. Ini tentu ada konteks mendorong pertumbuhan ekonomi dan seterusnya.

Tapi saya ketemu langsung, Pak, kemarin sama maskapai, bisa nanti dikoreksi Pak Menteri ya, Pak Menteri mungkin nanti boleh koreksi ke maskapai LionAir Grup, kemudian AirAsia dan Citilink, boleh dikonfirmasi, apakah betul mereka berminat membuka jalur internasional di sana. Itu yang disampaikan pada kami langsung dan waktu itu ada Pak Samsurizal, Pak, bareng saya,

beliau juga mendengar langsung maskapai itu menyampaikan keinginannya supaya dibuka kembali status internasional bandara Supadio Pontianak, dan mereka yang siap nanti melaksanakan dan mengajukan izin internasional atau *slot time internasional* dari Supadio ke beberapa titik yang dituju yang tadi saya sampaikan.

Saya rasa itu barangkali yang dapat kami sampaikan, Pak Menteri, pada kesempatan yang berbahagia ini. Pak Menteri tidak perlu jawab ya, Pimpinan ya, ini tidak usah dijawab satu per satu, Pak ya, Bapak jawab *highlight* saja yang lain nanti tertulis, Pak, bisa kami baca dan kami lihat. Dan nanti manakala jawabannya kurang setelah tertulis, nanti dikirim kami bisa memanggil kembali untuk memperjelas hal-hal yang dipandang perlu.

Demikian yang dapat saya sampaikan, oh terakhir nih, Pak. Sebenarnya kemarin kita udah bahas ini, masalah kita sekarang untuk bandara-bandara kecil itu sekarang adalah ketiadaan pesawat ATR, Pak.

Jadi bandara kita bangun banyak, masif kita bangun bandara, 10 tahun, tapi maskapainya nggak ada, gitu ya. Ini juga soal ini, ini saya rasa juga tantangan perlu dipikirkan bersama-sama supaya kita mendorong bagaimana maskapai kembali mampu dan siap untuk terbang ke bandara-bandara kecil yang kita sudah buat untuk kita mempercepat ya.

Ini sekarang infrastruktur ini ada, bandaranya nggak ada, apa namanya, pesawatnya tidak ada dan masyarakat juga menantikan bagaimana *recovery* ini, *recovery* dari covid contohnya ya terkait pertumbuhan ekonomi ini bisa dipercepat dengan konektivitas yang maksimal dari seluruh infrastruktur transportasi yang sudah ada.

Saya rasa demikian.

Saya persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan jawaban atas masukan, pendapat dan saran dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang terhormat.

Saya persilakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (IR. BUDI KARYA SUMADI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Ketua,
Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan
Bapak-Ibu Anggota Komisi V,

Saya akan menjawab berkaitan dengan capaian penyerapan, tolong di-*share* halaman 3.

Jadi ini adalah satu hasil minggu pertama dan kalau dilihat dari tabel yang di sana, prognosa kita itu lebih-lebih tinggi daripada realisasi, tolong slide nomor 3, *slide* nomor 3. Ini,

Bapak Pimpinan, dan
Anggota,

Kita bisa merealisasikan tahun 2022 itu 98% dari program 97%, jadi di atas ya. *Nah*, ini baru minggu pertama, kontrak-kontrak relatif sudah berlangsung semuanya. Jadi ini adalah berkaitan dengan tinggal pembayaran dan administrasi. Saya yakin bahwa kita mampu untuk melaksanakan paling tidak sama dengan 2022 ya, yakini kami itu bisa laksanakan karena kami sudah *check*.

Nah, satu yang memang ada masalah adalah IMO yang mustinya diterima kereta api 500 miliar, namun tidak diterima. Saya akan besok konsultasi Ibu Menkeu untuk digunakan kereta api yang lain, sehingga penyerapannya akan naik. Itu yang pertama.

Yang kedua, soal bis. Bis-nya udah ada semua ya, jadi ada 8 Anggota yang belum menerapkan lokasinya di mana. Ya, jadi saya tidak sebutin namanya, ada 8 yang belum ditetapkan secara pasti. Jadi minggu depan ini sudah ada *dropping* tentang lokasi-lokasinya.

Yang lain adalah kalo Kayong sama anu, kapan kita ngomong bertiga ya. Ya, kita ngomong bertiga aja ya, oke. Ya, kita bertiga aja, berempat lah sama Pak Ketua ya.

Lalu yang penting juga Tanjung Perak, Pak Eddy. Jadi benar dugaan Pak Eddy, ternyata Pemda tidak mampu dan saya minta Pemda menyerahkan ke kami, sudah ada surat dan kami sedang memproses. Cuma memang Amdalnya lama, Pak, ini kita lagi nunggu itu. Kalau investornya ada tiga, curah padat sudah ada investornya, curah cair sudah ada investornya dan curah ... (rekaman suara kurang jelas) sudah ada. Jadi *Insya Allah* minimal pada saat tahun depan itu semua udah selesai, tinggal kita tenderkan saja ya, menunjuk siapa kontraktornya itu.

Lalu berikutnya yang penting juga mengenai Sekayu, Pak. Sekayu itu punya Pemda, Pak, jadi kami merasa, bahwa kami nggak punya kapasitas untuk melakukan itu.

Dari Pak Irwan, pelabuhan laut itu Pak Irwan, sekarang itu pelabuhan laut yang sekarang itu *under capacity*. Ya, jadi kami kalau nambah jadi *over* dan di tempat Bapak banyak sekali itu pelabuhannya PU. Nanti setelah pembangunan itu kita lakukan, siapapun kita lakukan kalau bisa swasta. Jadi swasta sewa pada PU, PU dapat PNBPN dan itu banyak sekali.

Pak Menteri PU sudah ngomong sama saya jangan dikasih Pelindo, oh setuju. Jadi nanti PU kerja sama dengan swasta. Jadi nanti kalau ada pemain-pemain swasta daerah yang sudah siap, kita daftar aja, Pak, mulai sekarang menyiapkan perusahaan, menyiapkan orang, begitu selesai IKN kita berikan kepada masyarakat.

Lalu berikutnya, kami sampaikan berkaitan dengan-dengan bis air ya, nanti Bu Irene, nanti kita akan perhatikan untuk kita lakukan. Pak Adi berkaitan dengan apa yang disampaikan, juga akan kita perhatikan, nanti kepala balainya *sowan* Bapak itu.

Lalu palang pintu, ini kewenangan dari Pemda, jadi kami akan kumpulkan lagi Pemda, karena akan bagi tugasnya seperti itu.

Terima kasih, Pak, masukan tentang *feeder*, kita akan intensifkan *feeder* di Jakarta supaya lebih bagus. Yang paling parah itu di Karawang, Pak, yang belum ada, kalau di apa namanya, di Tegalluar memang belum maksimal, kita akan maksimalkan di situ.

Lalu Pak Ruslan, Malikulsalleh, mungkin saya koreksi Pak Ruslan, kita akan perbaiki, tapi terbatas *runway*, Pak, karena terminalnya cukup memadai.

Lalu Pak Ridwan Bae, saya pikir itu penting, Pak Dirjen Darat, berkaitan dengan pelabuhan itu. Lalu mengenai semua bis, tadi administrasinya tolong diselesaikan.

Pak Lasarus, berkaitan dengan kereta cepat, kami regulator intensif, Pak, terutama juga KRL. Mestinya itu yang punya perusahaan yang control, tapi kami yang panggil, saya udah lapor Presiden, saya control, baik kereta cepat maupun KRL tentang *case-case* yang terjadi. *Insyah Allah* Desember ini akan selesai, Pak.

Tentang yang akan dibuat Panja, tunggu dulu, Pak, kasih kami waktu 6 bulan, kami buat satu *case*, ada satu pemantauan yang *online*, Pak. Sekarang ini ada indikasi, bahwa jumlah yang diekspor itu tidak sama dengan yang sebenarnya, jadi kalau nanti ada system, nanti *real-time*, Pak. Jadi Tersus-Tersus itu bisa kita pantau dan *Insyah Allah* itu bisa naik, minimal 20 sampai 50% akan naik, Pak, jadi itu akan kita lakukan. Saya kemarin sudah lihat yang di Pelindo, Pak, bagus sekali dan *Insyah Allah* kami bisa laksanakan.

Bapak-Ibu sekalian,

Itu yang bisa saya jawab secara umum, yakini kami bekerja keras ya juga mendampingi Bapak menjelang-menjelang Pileg ini ya. Jadi kalau ada pemberdayaan masyarakat temen-temen tolong disegerakan, kita masih punya dua bulan.

Terima kasih Pak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan Bapak-Ibu Anggota.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Menteri.

Teman-teman sekalian,

Sebentar, Pak, sebentar. Nanti saya kasih kesempatan tenang aja. Kita kasih apresiasi untuk kalimat terakhir Pak Menteri, Pak. Dia mengatakan, sebentar dulu, kalimat terakhir Pak Menteri tadi bilang “Saya akan bekerja keras mendampingi teman-teman yang akan maju lagi sebagai Pileg”, Bapak kasih apresiasi ya.

Jadi itulah yang ditunggu-tunggu, Pak Tamanuri tadi, saya ada di sini Pak, tenang aja ya, saya ada di sini. Saya tahu apa yang Bapak...

F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Tenang saja Ketua, saya sudah di sini Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya saya sudah di sini ya, tenang saja, oke ya. Baik,

Bapak-Ibu sekalian,

Pak, Ibu Irene, Ibu-Ibu ketawa kalau saya bilang “Saya ada di sini”, apa yang Ibu pikirkan sebetulnya? Ya, sama ya, sama-sama yang saya pikirkan.

Baik, sebentar, sabar dulu, Pak, jangan tegang-tegang kita walaupun saya juga belum makan siang ini, belum makan siang. Baik,

Bapak-Ibu sekalian,

Terima kasih, Pak Menteri, terima kasih atas komitmen, Bapak. Pak, kami kalau, kami kalau boleh jujur, Pak ya, Bapak ini the best sebagai menteri mendampingi kami di Komisi V, Pak. Selama 10 tahun Bapak sangat memahami Komisi V ini ya, dan cepat responnya Pak Menteri terhadap seluruh persoalan yang ada di masyarakat ya. Terima kasih, Pak Menteri. Kerja keras dan apresiasinya terhadap seluruh masukkan, pendapat dan saran dari Komisi V DPR RI.

Baik, saya persilakan Pak Ali Mufthi,
Pak Ustadz silakan.

F-PG (DR. H. ALI MUFTHI, S.AG., M.SI.):

Makasih, Pak Ketua.

Satu, Pak, denger-denger di, sebelah kiri, masalah PJU. Ya PJU, penerangan jalan. *Nah*, ini yang harus dipastikan karena ada 7 provinsi yang belum dilaksanakan, satu.

Yang kedua, Pak Ketua, Pak Menteri mau mendampingi kita di 14 Februari ini, ini yang harus dikonkritkan ya, kalau betul itu kita apresiasi implementasinya. Misal begini Pak Ansar, Ansar, Ansarullah ya kita akan ditolong Allah ini lewat Pak Menteri ini. Oleh karena itu....

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pak izin, saya interupsi, Pak.

Saya rasa Bapak ndak perlu perjelas ini, ndak usah diurai, nanti saya pikirkan, udah denger nanti, nggak perlu diurai, Pak.

F-PG (DR. H. ALI MUFTHI, S.AG., M.SI.):

Saya nggak mau urai Pak, saya hanya mengusulkan aja....

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Saya rasa udah bisa ditangkap Pak, maksudnya udah bisa ditangkap, sudah bisa ditangkap, oke ya.

Pak Sudjadi silakan.

F-PDI PERJUANGAN (IR. SUDJADI):

Saya sangat berterima kasih dengan doanya, Pak Menteri. Cuman jangan sampai nanti 2004 itu kita belum lagi, mohon ada, ada semacam *stressing*, bantu lampu berapa, bantu bis berapa.

F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Ketua, izin, Ketua.

Bahasa mendampingi itu sudah meluas dan bijaksana kalau diurai sempit lagi, Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Sudahlah, sudah jelas itu oke sudah paham.

F-PDI PERJUANGAN (HARVEY B. MALAIHOLLO):

Pak Ketua, interupsi sebentar, Pak Ketua

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Siap, Pak.
Silakan, Pak.

F-PDI PERJUANGAN (HARVEY B. MALAIHOLLO):

Saya mau menyampaikan usulan dari kabupaten apa namanya ...

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Silakan, boleh.
Kalau-kalau amanat dari rakyat, dosa tidak disampaikan.
Ya, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (HARVEY B. MALAIHOLLO):

Ya, makasih, Pak.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Silakan, Pak Roberth, saya lihat udah megang-megang, siap-siap,
Silakan Pak.

F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Baik, terima kasih Ketua.

Saya terima kasih, bangga dan salut kepada Pak Budi atas komitmen Pak Budi terhadap kami tadi. Cuman yang jadi masalah, Pak Budi, kami tidak ingin cuman dapat komitmen dari Bapak di sini, kami di daerah, tolong jajaran Bapak di daerah itu yang paling penting, karena selama ini belum terlalu *connect* dengan kami di daerah kami, ya, pertama.

Makanya saya dengar apa yang Bapak sampaikan. Teman-teman semua bertepuk tangan, saya tidak, Pak, karena saya ingin bagaimana nanti di daerah akan merapat kepada kita tidak, itu. Harapan saya komitmen Bapak ini bisa terwujud nanti, dengan bagaimana jajaran Bapak di daerah itu akan merapat untuk merealisasi program-program yang sudah ada yang kita sampaikan tadi. Itu saja yang paling penting untuk kita, bahwa ada beberapa program yang belum jalan, itu bisa terlaksana, itu sudah suatu apresiasi yang

diberikan oleh Bapak dan jajaran. Jadi, Pak Pimpinan, itu yang saya inginkan bahwa, bagaimana nanti realisasi yang telah disampaikan di tempat ini, itu bisa sampai ke daerah kita.

Yang berikut, Pimpinan, saya kira kita semua sudah sepakat sudah ikut mengetok APBN 2024 ini, maka saya kira Undang-Undang APBN-nya juga sudah keluar keputusan Presiden untuk 2024, maka kita mungkin saya minta juga untuk kita bisa rapat nanti khusus dengan para Eselon untuk membedah semuanya. Bener APBN ini yang kemarin kita bicarakan dan kita sudah setuju itu, apakah betul sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan. Jangan sampai nanti berubah-ubah ya kan. Yang saya tadi saya sampaikan kemarin di Dapil saya, sudah masuk ini, tiba-tiba tidak ada, kenapa? Kita ingin juga mendapat masukan-masukan seperti apa, nah program-program yang sudah kita putuskan.

Saya kira tidak ada lagi yang bisa kita ragukan atau takutkan, Ketua, karena kita bedah 2024, itu kan semua sudah selesai. Jadi kita bisa bedah di sini, mau di mana saja, per eselon untuk berembuk secara luas program-program yang sudah kami putuskan.

Saya kira itu yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, sudah bisa kita tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Roberth.

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya, Bu Novi silakan.

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Tadi kan ada beberapa yang belum dijelaskan, jadi mohon nanti ada....

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Tertulis Bu, nanti ada, dari awal sudah saya tegaskan.

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Ya, terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pak Eddy, silakan.

F-GERINDRA (IR. H. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Tadi saya ada yang lupa, aspirasi dari masyarakat sama dengan Pak Ketua tadi. Jadi ini Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II International Airport, *ndak* ada lagi yang terbang ke luar. Dahulu sebelum covid ada ke Singapura dan Malaysia.

Nah, masyarakat berharap satu saja ke Malaysia saja dulu, karena pekerja kita banyak, mahasiswa juga banyak dari Palembang ke yang belajar di Malaysia, gitu, mohon ini pertimbangkan lagi. Tentu lobi Pak Menteri dengan operator penerbangan lebih-lebih mantap, saya kira.

Makasih, Pak. Jadi dibuka lagi lah itu.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, terima kasih.

Pak ya, silakan Pak Tamanuri.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Saya langsung aja sama, Pak Menteri.

Pak Menteri, itu jalan kereta api dari Lampung ke batubara, mudah-mudahan saya salah, katanya adalah hasilnya diberikan kepada daerah-daerah yang kurang penghasil keretaanya, sedangkan kami di situ kan masih belum double track.

Nah, ini menghambat Pak, menghambat jalannya kereta-kereta penumpang yang lain. Oleh karena itu, kami mohon kiranya ini bisa di, tinggal nambah-nambah lagi, Pak, dari stasiun ini ke stasiun ini, dari stasiun ke stasiun sini, udah nyambung itu, karena di stasiun-stasiun itu sudah dibuat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, saya rasa cukup ya.
Pak Menteri ada yang mau disampaikan lagi?
Cukup Pak?
Silakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (IR. BUDI KARYA SUMADI):

Pak Tamanuri, Pak, *income* dari penerimaan kereta api itu diterima oleh PT KAI, bukan kami, Pak. Jadi kami nanti sesuai dengan kewenangan, kami akan memperbaiki stasiun, tapi untuk investasi yang besar, mestinya KAI bisa mengundang swasta untuk membuat KPBU, Pak, nanti di Komisi VI, Pak, tanya aja, Pak.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, cukup.

Kesimpulan rapat coba tampilkan.

Pak Menteri di kesimpulan rapat ini saya tampilkan, kembali perbaikan terkait pergeseran yang minor kemarin ya, ada beberapa penyesuaian angka-angka sebetulnya, tapi ini kan harus kita sahkan kembali di rapat komisi walaupun jumlahnya cuma sedikit ya, hanya ada berapa ada berapa ratus ribu saja, tolong ditampilkan ini. Komisi V DPR RI.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Selasa, 7 November 2023

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mempercepat realisasi program dan..., program dan kegiatan ya, program kegiatan tahun anggaran, tahun anggaran 2023 dimana capaian per 6 ini, 6 November 2023 sebagai berikut ya:

a. Kementerian Perhubungan realisasi keuangan 68,63%, realasi fisik 73,18%.

b. Komisi V DPR RI dapat.

Iya itu yang pertama, kemudian Komisi, ini terkait dengan perubahan penyesuaian angka-angka.

Pak, ini kita langsung saja, karena ini pun sudah kami, Pimpinan, tanda tangani kemarin, tapi perlu kita serahkan di sini.

2. Komisi V DPR RI dapat menyetujui pergeseran alokasi anggaran 2024 pada unit organisasi Eselon I Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal tidak ada perubahan, kemudian sekretaris jenderal juga tidak ada perubahan.

b. Ditjen Perhubungan Darat ada sedikit perubahan yang semula Rp6.664.310.961.000,00 menjadi Rp6.664.310.350,00 ya; kemudian

c. Ditjen Perhubungan Laut ya yang semula Rp9.538.475.833.000,00 menjadi Rp 9.550.000.000.000,00 ada ditambah sedikit ya, Rp26.444.000,00; kemudian

d. Dirjen Perhubungan Udara juga ada mengalami perubahan sedikit dari semula Rp7.709.675.236.000,00 menjadi 7 triliun 709 juta eh miliar, 779 miliar 626 juta 373 ribu rupiah.

Ini hanya selisih sedikit saja ya; kemudian hanya nampak beberapa rupiah

e. Ditjen Perkereta apian ini tidak ada perubahan, tetap ada ya, *sorry-sorry* ada perubahan dari semula Rp9.694.877.472,000,00 menjadi Rp9.683.327.472.000,00; kemudian

f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan semula Rp3.708.986.611.000,00 menjadi Rp3.708.986.474.000,00.

Ini juga hanya beberapa ribu rupiah pergeseran ini berkurang ini; kemudian

g. Badan Kebijakan Transportasi, ini tetap; dan

h. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek juga sama.

Baik, poin berikutnya.

3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk:

a. Meningkatkan sistem monitoring dan koordinasi dalam mempercepat realisasi program dan anggaran tahun 2023 di masing-masing unit Eselon I;

b. Memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di semua subsektor perhubungan,

c. Meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap program *Buy The Service* atau BTS, layanan terminal umum, serta terminal khusus atau Tersus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau TUKS; dan

d. Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI.

Ini kesimpulan rapat kita pada hari ini. Saya ingin merilis coba turun lagi poin yang, di poin nomor 2 ini, Pak Menteri, ini penting untuk kita tetapkan kembali sebagai dokumen, bahwa ini sudah diputuskan dan disepakati ya.

Saya minta persetujuan dulu dari teman-teman Pimpinan dan Komisi V DPR RI.

Apakah kesimpulan rapat ini dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Pak Menteri, setuju? Baik.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Dengan tercapainya kesimpulan rapat ini maka selesailah rapat kerja kita pada hari ini dengan Kementerian Perhubungan.

Saya atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas atensi kita semua.

Sebelum saya akhiri saya beri kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan kata-kata penutup.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (IR. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ketua,
Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan
Bapak-Ibu Anggota,

Saya berterima kasih atas masukan-masukan yang tentunya sangat relevan, juga berkaitan dengan kemanfaat untuk masyarakat, saya menugaskan para Dirjen dan di sisi-sisi terbawah, juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara intensif.

Lalu secara khusus, Pak, saya tegaskan lagi bahwa, *Insyah Allah* tahun 2023 ini lebih tinggi dari '22, 2022 itu adalah 97,9 *Insyah Allah* tahun ini lebih. Jadi walaupun sekarang 68 itu karena tinggal ada pencairan-pencairan saja.

Di luar konteks itu, saya pikir kerjasama kita lakukan dengan baik, saya memberikan kesempatan Bapak-Bapak untuk melakukan suatu diskusi lebih intensif dengan Eselon I, karena memang secara program teman-teman Eselon I yang memiliki secara detail dan bisa dijabarkan secara detail.

Terima kasih.

Selamat siang,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Kita kasih *applause* buat Pak Menteri.

Terima kasih, Pak Menteri.

Sekali lagi saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kemitraan kita selama ini terkhusus juga dalam rapat pada hari ini ya, dan mohon maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian rapat saya nyatakan selesai dan saya tutup dengan mengucapkan *syukur alhamdulillah*, rapat saya nyatakan ditutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.15 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

Jakarta, 7 November 2023
a.n. **KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002